

Buletin

KIPRAH

K I N E R J A P E M I M P I N D A E R A H

KALTARA



**INDUSTRI
LOKAL**

Sasar

**PASAR
GLOBAL**

Edisi Oktober 2023
Biro Administrasi Pimpinan

Berlari Mewujudkan Kalimantan Utara Berubah Maju Sejahtera

*Catatan 3 Tahun Kepemimpinan Gubernur-Wagub Zainal A Paliwang-Yansen TP

Sejak dilantik 15 Februari 2021, Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum dan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si berusaha memenuhi tuntutan pembangunan daerah ini.

Awal kepemimpinannya itu, langkah-langkah kebijakan yang diambil untuk memacu pembangunan daerah, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan terbilang tidaklah mudah, sebab diadang pandemi COVID-19.

"Alhamdulillah berkat kerja keras dan kerja sama yang baik antar semua lini masyarakat, sehingga Kalimantan Utara bisa menekan COVID-19 dan kini berstatus endemi," kata Gubernur.

Kalimantan Utara merupakan provinsi yang dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 yang disahkan pada 25 Oktober 2012. Provinsi ini masuk dalam daftar daerah tertinggal sehingga Pemerintah Daerah harus mampu menjawab tantangan itu melalui berbagai program pembangunan.

Sepuluh program prioritas Provinsi Kalimantan Utara dicanangkan dalam rangka Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada 204 fokus pada sepuluh hal prioritas. Yakni pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Mentarang Induk dan Sungai Kayan; pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI); mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas.

Pertanian dalam arti luas meliputi perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi pada tiap kabupaten/kota. Prioritas selanjutnya adalah meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman, dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa, menata kota dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai, udara, serta informasi teknologi.

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota; pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komparatif di setiap kabupaten/kota; peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun.

Kemudian, pengadaan Balai latihan Kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial; pengelolaan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM.

Prioritas terakhir, pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan dan kependidikan semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman, dan terpencil, serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Gubernur mengatakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan termasuk dalam program prioritas pembangunan Kalimantan

Utara adalah Kawasan Industri Hijau (KIHI), yang akan menjadi kawasan Industri Hijau terbesar di dunia.

Kawasan yang berlokasi di Kabupaten Bulungan itu menjadi pilot project Green Industrial Park di Indonesia akan menghasilkan produk berupa *Petrochemical, Electronic Aluminum, Steel, New Energy Battery, Industrial Silicon, Polycrystalline Silicon, Solar Panel*. Proyek ini didukung dengan pembangunan PLTA Kayan dan Mentarang yang akan menyuplai energi ke kawasan industri sehingga energi yang digunakan adalah energi baru terbarukan.

Tantangan pembangunan yang dialami Kalimantan Utara salah satunya akses jalan yang belum merata, salah satunya akses Malinau-Krayan. Moda transportasi udara adalah pilih terbaik untuk menjangkau Krayan dibanding roda dua maupun roda empat.

"Tapi Alhamdulillah kemarin saya ke sana menggunakan transportasi darat (bermotor) dan sekarang sudah tembus, tetapi masih tahap konstruksi dan kita berharap dapat operasional pada 2024 nanti," ujarnya.

Guna menjamin semua pembangunan yang dilakukan tetap berjalan, Gubernur menegaskan Pemprov Kalimantan Utara akan terus melakukan monitoring dan evaluasi, serta kerjasama dan sinergi stakeholder yang ada dan kabupaten/kota.

"Monitoring dan evaluasi ini kita lakukan di setiap daerah secara terjadwal, yang dipimpin langsung Kepala Daerah, karena pembangunan yang saya dan Wakil Gubernur usung adalah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota," ujar Gubernur.

Beberapa program lain yang telah dilaksanakan seperti Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang dan orang untuk meringankan biaya transportasi dan logistik masyarakat ke perbatasan yang penganggarannya sebesar kurang lebih Rp15,5 miliar dari APBD.

Ada lagi Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara (Pro LanteraKU) yaitu Pelayanan Dokter spesialis yang bersifat sambut bola kepada masyarakat kawasan Perbatasan. Peningkatan Layanan Dokter terbang meliputi Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Penyakit Mata, Dokter Spesialis Kulit, Dokter Spesialis Anak yang dapat menghemat biaya masyarakat untuk berobat hingga Rp35.493.410.895 dalam tiga tahun pelaksanaannya.

Tentang pengembangan sektor pertanian, Gubernur menjelaskan sangat mendukung sepenuhnya, utamanya keterlibatan petani-petani milenial daerah. Karena itu bisa menjadi pembangkit semangat untuk tumbuh khususnya bidang pertanian.

"Kita tahu kaum milenial berkecimpung di sektor pertanian maka mereka akan mendapatkan *income* yang tentunya dapat membantu pertumbuhan ekonomi," demikian Gubernur. BIRO ADPIM

Redaksi

Pengarah

- Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Utara

Penanggungjawab

- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara
- Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara

Redaktur

- Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
- Koordinator Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara

Editor

- Sub Koordinator Komunikasi dan Penyedia Informasi Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara
- Sub Koordinator Penetapan Materi Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara
- Sub Koordinator Dokumentasi Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara

Reporter

- Staf pelaksana Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara

Fotografer

- Staf pelaksana Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara

Perwajahan

- Staf Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara



Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang membidik sasaran anak panah saat pembukaan Gernas BBI dan BBWI di Tanjung Selor pada 20 Mei 2023. Wakil Gubernur, Yansen TP tampak mendampingi.



Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang menandatangani prasasti peresmian proyek investasi kilang LNG mini milik swasta di Kabupaten Tana Tidung pada 30 April 2023.

Melanjutkan Optimisme Pertumbuhan

Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara pada akhir 2023 diperkirakan tumbuh tinggi melanjutkan pencapaian 2022, terutama didorong oleh prakiraan kinerja positif pada mayoritas sektor utama.

“Pertumbuhan perekonomian Kalimantan Utara juga diperkirakan sejalan dengan pertumbuhan perekonomian nasional,” kata Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum.

Perekonomian Kalimantan Utara triwulan satu 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp37,64 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 16,82 triliun. Ekonomi Kalimantan Utara triwulan satu 2023 terhadap triwulan satu 2022 mengalami pertumbuhan 5,23 persen (*y-on-y*).

Selanjutnya, pada triwulan dua 2023, perekonomian Kalimantan Utara yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp36,73 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp17,23 triliun. Ekonomi Kalimantan Utara triwulan dua 2023 terhadap triwulan dua 2022 mengalami pertumbuhan 5,01 persen (*y-on-y*).

Analisis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara, pada 2023, sektor pertanian dan perikanan diperkirakan kembali tumbuh positif seiring dengan prakiraan kondisi cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada keseluruhan 2023 yang

lebih kondusif dibandingkan dengan 2022.

Kondisi ini akan berdampak pada peningkatan produktivitas komoditas pertanian dan perkebunan di tengah potensi peningkatan demand pada komoditas pertanian utama Kalimantan Utara seperti kelapa sawit dan rumput laut dan produk perikanan seperti ikan, udang dan kepiting.

Sejalan dengan itu, lapangan usaha Industri Pengolahan juga diperkirakan akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi di 2023. Permintaan produk *crude palm oil (CPO)* diperkirakan akan mengalami pemulihan pasca sempat terjadi pelarangan ekspor di triwulan satu dan dua 2022.

Penjualan ekspor *CPO* telah kembali berjalan sejak Maret 2023 setelah sepanjang tahun 2022 tidak dilakukan penjualan ekspor. Selain itu, program peningkatan penggunaan biodiesel B35 secara nasional sebagai bahan campuran bahan bakar juga diproyeksikan akan turut mendorong kenaikan permintaan pasar domestik terhadap *CPO*.

Selain itu, permintaan komoditas minyak goreng dari India dan Tiongkok diperkirakan mendorong peningkatan produksi yang diperkirakan tumbuh sebesar 3-5 persen (*yoy*). Hal ini turut didukung oleh 57 perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit dan 20 pabrik kelapa sawit di Kalimantan Utara.

Produk lainnya seperti produk perikanan olahan

juga diperkirakan tumbuh positif seiring dengan kembali pulihnya permintaan dari sejumlah negara mitra dagang utama Kalimantan Utara, seperti Jepang dan China yang telah menghentikan kebijakan *zero covid policy*.

Pencabutan status pandemi oleh Pemerintah Pusat sejak triwulan dua 2023 juga diperkirakan akan mendorong pertumbuhan pada lapangan usaha perdagangan.

Hal ini seiring dengan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat dan diperkirakan kembali ke level sebelum pandemi serta pelaksanaan sejumlah agenda besar yang dapat kembali diadakan secara langsung pada 2023, khususnya pada triwulan tiga dan empat 2023 seperti Festival Iraw Tengkeyu, Birau dan Harvesting Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Nasional Bangsa Berwisata di Indonesia (GBWI) Kalimantan Utara 2023.

Lapangan usaha konstruksi juga diperkirakan akan mendorong pertumbuhan di 2023 terutama didukung oleh pembangunan sejumlah proyek strategis di Kalimantan Utara seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu (Labang, Long Nawang, Long Midang) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan dan Mentarang Induk, serta pembangunan proyek strategis Pemerintah Daerah seperti pembangunan gedung kantor pemerintahan, DPRD dan pembangunan jalan perbatasan.

Adapun pembangunan areal KIHI pada 2023

diperkirakan akan terakseleratif khususnya pada kawasan industri aluminium smelter dan kawasan industri *petrochemical* seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur dasar seperti pelabuhan *jetty*, gedung operasional pengelola, *water treatment plant*, dan terminal khusus.

Prakiraan kinerja lapangan usaha konstruksi tersebut juga sejalan dengan kenaikan target realisasi investasi Kalimantan Utara pada 2023 yang ditetapkan oleh BKPM, sebesar Rp29,5 triliun, 310 persen lebih tinggi daripada target pada 2022 sebesar Rp9,5 triliun.

Lapangan pertambangan diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun lebih lambat dari capaian 2022. Hal ini seiring dengan prakiraan normalisasi demand komoditas bahan baku energi global di tengah ketegangan geopolitik di kawasan Eropa yang diperkirakan mulai mereda.

Selain itu, prakiraan perlambatan kinerja lapangan usaha pertambangan juga sejalan dengan siklus *commodity boom* yang sudah melewati fase puncaknya pada 2022.

Kemudian, permintaan batubara domestik terutama untuk industri smelter nikel dalam negeri. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada 2023 diperkirakan akan ditopang oleh menguatnya Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah, serta investasi (PMTB) untuk akselerasi pembangunan proyek strategis.

Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan tumbuh positif seiring dicabutnya status pandemi pada triwulan dua 2023 yang berdampak pada kenaikan mobilitas masyarakat sehingga akan meningkatkan *demand*, terutama di triwulan dua dan empat 2023.

Konsumsi Pemerintah juga diperkirakan akan memberikan andil positif bagi perekonomian 2023 terutama karena berlanjutnya

pembangunan sejumlah gedung Pemerintah seperti gedung DPRD dan pembangunan infrastruktur pendukung di sekitar kawasan proyek strategis nasional.

Berbagai kegiatan pada 2023 juga diperkirakan sudah dapat dilakukan secara luring, sehingga akan berdampak pada peningkatan konsumsi.

Adapun beberapa ajang besar di Kalimantan Utara seperti Iraw Tengkeyu, Musik Alam Fest, dan Gelar Budaya Adat Dumud yang masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) 2023 juga diperkirakan akan mendorong kinerja positif konsumsi rumah tangga maupun Pemerintah.

Kenaikan target baik pendapatan maupun belanja daerah Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Utara hampir di atas 30 persen diperkirakan turut mengakselerasi konsumsi Pemerintah.

Momen Pemilihan Umum 2024 yang didahului dengan masa kampanye pada 2023 ini juga turut mendorong konsumsi rumah tangga dan Pemerintah. Investasi pada 2023 juga diperkirakan akan kembali tumbuh signifikan sejalan dengan peningkatan target realisasi investasi pada 2023 menjadi sebesar Rp27 triliun, setelah realisasi pada 2022 yang melebihi target sebesar Rp9,5 triliun.

Peningkatan target realisasi tersebut sejalan dengan berlanjutnya pembangunan sejumlah proyek strategis di Kalimantan Utara. KIHI di Tanah Kuning Mangkupadi nantinya akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia yang terdiri atas kawasan industri petrokimia, industri *smelter* aluminium, dan baterai *electric vehicle*.

Pembangunan PLTA juga diperkirakan akan diakselerasi, sejalan dengan rencana groundbreaking PLTA Sei Pancang oleh Presiden Republik Indonesia pada Februari 2023, serta infrastruktur dasar seperti jalan penghubung antar daerah, khususnya di daerah perbatasan.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor risiko yang dapat menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara yang lebih akseleratif. Kinerja perekonomian sejumlah negara tujuan ekspor Kalimantan Utara seperti Tiongkok dan India yang diperkirakan belum terlalu akseleratif dapat berdampak pada melambatnya permintaan ekspor sejumlah komoditas unggulan seperti batubara dan produk perikanan.

Perekonomian Tiongkok pada 2023 diperkirakan tumbuh melambat sejalan dengan masih lemahnya keyakinan pelaku ekonomi dan utang rumah tangga yang tinggi. Kondisi tersebut dapat berdampak pada melambatnya kinerja industri khususnya manufaktur sehingga berdampak pada turunnya demand ekspor.

Selain itu, masih berlanjutnya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina juga dapat berdampak pada terganggunya rantai pasok global serta tingginya harga komoditas energi.

BIRO ADPIM



Potret dari udara salah satu areal pembangunan KIH Tanah Kuning yang dikembangkan oleh salah satu investor.

Memacu Kawasan Industri Hijau Indonesia

Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan Pemerintah Kabupaten Bulungan memacu dan mengawal pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIH) Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan agar terus berprogres, sejak Presiden RI Joko Widodo meletakkan batu pertama proyek itu pada 21 Desember 2021.

Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum sebut pengelola KIH tengah melakukan berbagai kegiatan di lapangan antara lain pematangan lahan, mobilisasi peralatan, bahkan ada yang mulai tahap konstruksi.

KIH Tanah Kuning merupakan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan target luas pengembangan mencapai 30.000 Hektare (Ha). Terdapat tiga Pengelola Kawasan yaitu PT. Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI); PT. Indonesia Strategis Industri (ISI); dan PT. Kayan Patria Propertindo (KPP).

Investasi yang akan difasilitasi di kawasan industri ini antara lain pemurnian dan pengolahan mineral, pergudangan, properti, perdagangan, dan komersial.

Tahap awal, lahan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan industri ini seluas 10.100 Ha dengan pasokan listrik dari PLTA Mentarang Induk (Malinau) yang tengah tahap persiapan konstruksi Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang oleh perusahaan konsorsium Indonesia dan Malaysia.

PSN KIH Tanah Kuning dibangun dengan nilai investasi 132 miliar dolar AS. Cakupannya adalah Pabrik Petrokimia yang diproyeksi menjadi pabrik petrokimia terbesar di Indonesia dengan kapasitas mencapai 4x16 juta ton per tahun.

Selanjutnya, pembangunan Smelter Alumina berkapasitas tiga juta ton, Pabrik Besi dan Baja (*iron and steel*) dengan kapasitas lima juta ton per tahun, Pabrik Baterai Kendaraan Listrik maupun pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan berkapasitas 265 Giga Watt Hour (GWh). Juga *Polycrystalline Silicon* dengan kapasitas 1,4 juta ton.

Produksi pertama Smelter Aluminium oleh PT. Kalimantan Aluminium Industry (KAI) akan dilaksanakan pada semester pertama 2025 dengan produk aluminium ingot batangan tahap awal sebanyak 500 ribu ton per tahun dan akan mencapai tiga juta ton per tahun pada tahap akhir.

PT. KAI memiliki target karyawan lebih dari 6.000 orang pada tahap konstruksi dan 1.500 orang karyawan operasional pasca konstruksi. Saat ini sudah memiliki hampir 1.000 pekerja. Investor tenan ini sudah membangun pelabuhan Jetty Tersus A Utara sepanjang 835 meter dan Jetty Tersus B Selatan sepanjang 726 meter.

Perusahaan tenan lainnya adalah PT. Kaltara Power Indonesia, yang akan membangun energi listrik menggunakan pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 1.000 MW sebagai transisi

energi dari kawasan menuju energi hijau PLTA yang akan dibangun di Sungai Kayan dan Sungai Mentarang dengan kapasitas total 10.375 MW.

Adapun industri petrokimia terbesar di Indonesia bahkan di dunia juga akan hadir di KIH dengan target produksi mencapai 4x16 juta ton per tahun. Perusahaan yang akan membangun industri petrokimia ini, PT. Taikun Petro Chemical, Tsingshan Group, telah mobilisasi alat kerja, alat berat, alat angkut, dan mematangkan area seluas 1.000 Ha. Perusahaan ini telah membangun Pelabuhan Jetty sepanjang 800 meter ke arah laut dan puluhan *dormitory* untuk tenaga kerja.

Selain itu, dua investor lainnya yakni PT. Indonesia Strategis Industri (ISI) dan PT. Kayan Patria Propertindo (KPP) tengah mengajukan Program Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) wilayah laut dalam rangka membangun tempat komersial, perdagangan, pelabuhan, pergudangan, dan properti.

Satu investor lagi yaitu PT. Kawasan Industri Kalimantan Indonesia (KIKI) akan membangun industri baterai lithium di atas kawasan seluas 4.704 Ha dan telah mendapatkan persetujuan KKPR dari Pemerintah.

Adapun PT. Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) mengelola kawasan seluas lebih dari 13.000 Ha yang berada di desa Mangkupadi. Menjadi salah satu pengelola aktif di kawasan KIH karena telah melakukan sejumlah pekerjaan yaitu membangun gedung kantor pengelola lahan mencapai 100; melakukan pematangan lahan lahan mess karyawan *dormitory* seluas 10 Ha; telah menyiapkan lahan limbah seluas 12 Ha; telah *komisioning* pembangunan sistem air bersih; dan persiapan pembangunan infrastruktur

dasar dalam kawasan jalan dan jembatan pada semester II 2023 ini.

Presiden Joko Widodo Tinjau Progres

Pada 28 Februari 2023, Presiden RI Joko Widodo meninjau progres PSN KIH di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.

Usai peninjauan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan industri hijau terbesar di dunia yang mampu menjadi masa depan Indonesia dalam pembangunan industri energi hijau (*green energy*).

"Ini kawasan Industrial Park Indonesia yang semuanya seluas 13 ribu *hektare* yang nantinya ini dipersiapkan untuk pembangunan industri EV baterai, yang pertama," ujar Presiden RI.

Yang kedua, kata Presiden, untuk pembangunan petrokimia (*petrochemical*). Kemudian yang ketiga, untuk pembangunan industri aluminium.

"Yang semuanya kita harapkan nanti didukung oleh energi hijau, oleh *renewable energy*, oleh *hydropower* dari Sungai Mentarang, Sungai Kayan di Kalimantan Utara," ujar Kepala Negara.

Presiden meyakini bahwa nantinya kawasan tersebut dapat menghasilkan produk-produk hijau yang bersaing. Presiden menilai, hal itu akan menjadi kekuatan bagi kawasan industri hijau tersebut.

"Kita harapkan dengan kekuatan kompetitif seperti itu, energinya hijau, kemudian barang-barang produknya yang dihasilkan juga produk-produk hijau, inilah yang akan menjadi kekuatan

kawasan Industrial Park Indonesia di Kalimantan Utara," tutur Presiden.

Presiden pun mengatakan bahwa kawasan KIPI mampu menjadi masa depan Indonesia yang dapat menjadi daya tarik bagi industri yang memproduksi produk hijau.

"Masa depan Indonesia ada di sini kalau ini terealisasi dengan baik, semuanya pasti akan berbondong-bondong ke sini, industri apapun yang berkaitan dengan *green product* pasti akan menengok ke kawasan ini," ujarnya. Presiden akan terus memonitor progres pembangunan kawasan industri hijau tersebut untuk memastikan agar pembangunan kawasan KIPI berjalan sesuai target yang telah ditentukan.

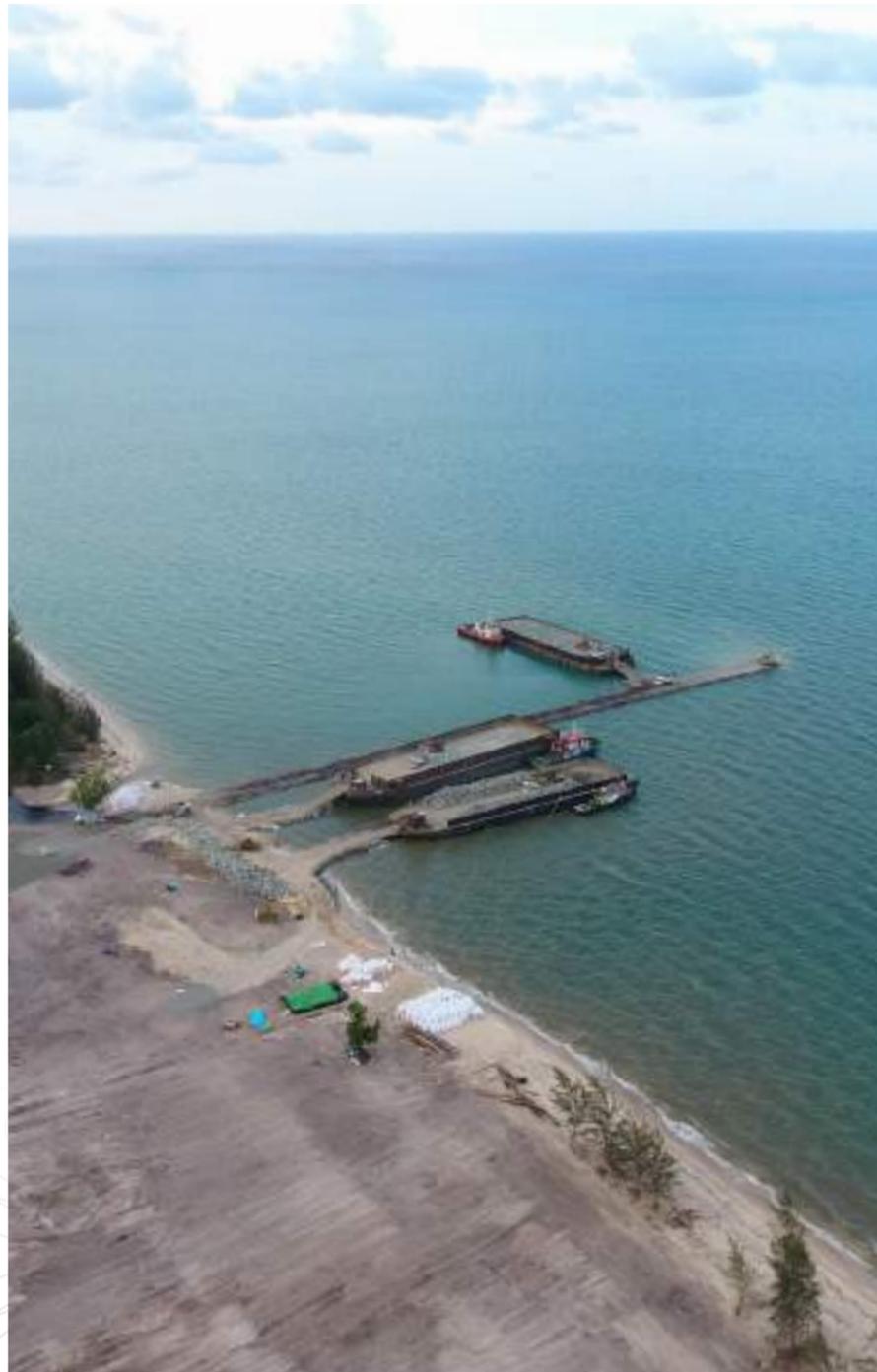
"Saya kira kalau melihat lapangan, kelihatannya saya tadi tanya di lapangan tidak ada masalah, perizinan semuanya sudah komplit, sudah siap," tutur Kepala Negara.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Bupati Bulungan Syarwani. **BIRO ADPIM**



Sisi darat area KIH Tanah Kuning tengah proses konstruksi.

Nilai Jual Potensi Investasi



Nilai jual potensi investasi di Kalimantan Utara mencapai lebih Rp10 triliun, berdasarkan data pada 17 dokumen *The Investment Project Ready to Offer (I-PRO)*, meliputi infrastruktur, pertanian ketahanan pangan, industri hilirisasi, pariwisata, energi, dan kawasan industri hijau.

I-PRO merupakan dokumen yang memuat informasi peluang investasi dan bisnis dengan nilai jual dan proposisi nilai yang unik, kesiapan teknis lokasi, peran pemangku kepentingan, strategi dan analisis pasar, perencanaan keuangan proyek, estimasi keuntungan, pengembalian investasi, skema insentif, dan analisis risiko.

Dokumen tersebut telah disampaikan pada kegiatan *'Kaltara Investment Forum 2023'* yang digelar Pemprov Kalimantan Utara bekerja sama Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI), dan Bank Indonesia (BI) di Kota Tarakan, pekan ketiga Agustus 2023

Secara geografis, Kalimantan Utara merupakan provinsi cukup strategis di wilayah ASEAN atau Indopasifik. Karena Kalimantan Utara berbatasan dengan Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam yang tergabung dalam forum BIMP-EAGA yang memiliki tujuan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan ASEAN.

Kalimantan Utara berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang langsung menghadap Samudra Pasifik. Posisi strategis ini sangat menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara. Berdasarkan proyeksi, penerimaan Negara dan Daerah dari ALKI II berpotensi mencapai 1,5 juta dolar AS per hari.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada kepemimpinan Gubernur Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH. M.Hum dan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si melakukan terobosan untuk mencapai peningkatan ekonomi Kalimantan Utara melalui peningkatan realisasi investasi sesuai target yang telah ditentukan, baik oleh Pemerintah Provinsi sendiri maupun Pemerintah Pusat lewat BKPM RI.

Capaian realisasi investasi di Kalimantan Utara terus meningkat sejak 2020 lalu. Realisasi investasi pada 2020 mencapai Rp3,2 triliun, 2021 mencapai Rp5,7 triliun, dan pada 2022 realisasinya mencapai Rp13,7 triliun.

"Pada semester pertama 2023 ini realisasi investasi di Kalimantan Utara sudah mencapai Rp9,4 triliun," ujar Gubernur.



Salah satu areal tenan investor di KIH Tanah Kuning.

Investasi merupakan salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang menjadi prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Karena itu, harus didukung dengan kebijakan yang pro investasi melalui peraturan daerah dan peraturan gubernur demi kepastian hukum sesuai yang diharapkan investor.

Pada kegiatan *'Kaltara Investment Forum 2023'* kemarin di Kota Tarakan, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara investor dengan vendor lokal Kalimantan Utara. Kerja sama itu wujud komitmen untuk mendorong pola kemitraan antara usaha besar dengan UMKM di daerah sesuai Peraturan Menteri Investasi atau Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 1 Tahun 2022.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga memberi kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Asosiasi Pengusaha di Kalimantan Utara memaparkan IPRO masing-masing kemudian melanjutkan sesi One On One Meeting dengan calon investor.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kegiatan KIF 2023 memberikan efek ganda bagi investasi provinsi ini ke depan.

POTENSI INVESTASI

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mencatat sejumlah potensi investasi di provinsi ini. Pertama, Pembangkit Listrik tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan 9.000 *Mega Watt* di Kabupaten Bulungan.

PLTA Sungai Kayan merupakan salah satu fasilitas pendukung utama Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIH) Tanah Kuning yang saat ini sudah masuk proyek strategis nasional (PSN).

Selain itu, terdapat investasi PLTA Mentarang Induk di Kabupaten Malinau senilai Rp 40 triliun yang telah di-grounbreaking oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Maret 2023. Investor telah memulai pengembangan Proyek PLTA Mentarang Induk berkapasitas 1.375 MW untuk mengirimkan energi terbarukan dalam jumlah besar dengan harga kompetitif secara regional untuk pengolahan bijih mineral Indonesia yang berkelanjutan di dalam negeri di Kawasan Industri Tanah Kuning dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pada saat yang sama, PLTA ini menyediakan sumber listrik yang lebih terjangkau dan tidak berpolusi bagi masyarakat di Kalimantan.

Adapula, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (sekarang disebut Kawasan Industri Hijau Indonesia/KIH) merupakan Proyek Strategis Nasional dengan target luas lahan mencapai 30.000 hektare (*Ha*).

Investasi yang akan difasilitasi di kawasan industri itu di antaranya pemurnian dan pengolahan mineral (perdagangan *property* hingga perdagangan dan komersial). Lahan yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan industri saat ini seluas 10.100 (tahap awal) *Ha* dengan pasokan listrik dari PLTA Mentarang Induk (Malinau) oleh

perusahaan konsorsium Indonesia dan Malaysia yaitu PT. Kayan Patria Pratama Group dan Sarawak Energy.

Selain itu terdapat potensi investasi menjanjikan di sektor kelautan perikanan seperti rumput laut, pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, serta sektor pertanian dan perkebunan seperti kakao, padi, dan sawit.

Gubernur menyebut potensi investasi baik yang sedang berproses maupun tengah tahap persiapan dan perencanaan membuka kesempatan kerja atau *demand for labour* bagi para pencari kerja. Meningkatnya investasi berdampak pada meningkatnya kegiatan produksi yang pada akhirnya turut meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. **BIRO ADPIM**

Investasi Semester I Rp8,7 Triliun



Pekerjaan konstruksi oleh investor di area KIH Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan.

Nilai investasi pada semester pertama 2023 di Provinsi Kalimantan Utara (Kalimantan Utara) telah mencapai Rp8,7 triliun, diserap dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN), berdasarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP-TSP) Kalimantan Utara dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Untuk diketahui, BKPM RI menetapkan target investasi di Kalimantan Utara pada 2023 sebesar Rp29,98 triliun. Sedangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) menetapkan target realisasi investasi senilai Rp7 triliun. Artinya target RPJMD telah terlampaui.

Realisasi investasi semester pertama 2023 terbentuk dari realisasi investasi kuartal pertama dan kedua 2023. Realisasi investasi pada kuartal kedua senilai Rp3,1 triliun. Lalu semester kedua senilai Rp5,6 triliun.

Sektor utama realisasi investasi Kalimantan Utara dibentuk oleh sektor primer (bidang usaha tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan), sektor sekunder (usaha industri kertas dan percetakan), dan sektor tersier (sektor industri listrik, gas, dan air).

Pada sektor primer terdapat sebanyak 194 proyek, diikuti sektor sekunder 103 proyek. Sektor tersier mendominasi sebanyak 518 proyek.

Gubernur menyebut, realisasi investasi itu mampu menyerap 3.773 tenaga kerja dengan rincian 3.722 tenaga kerja Indonesia dan 51 orang tenaga kerja Asing.

Gubernur Kalimantan Utara menyebut Kementerian Investasi/BKPM memberi target investasi yang tinggi kepada Provinsi Kalimantan Utara di wilayah Regional V, yaitu sebesar Rp29,98 triliun.

Target itu disusul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp21,26 triliun, Provinsi Bengkulu Rp19 triliun, Provinsi Gorontalo Rp5,48 triliun, Provinsi Papua Barat Rp4,61 triliun, dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp3,36 triliun.

Menurutnya, kenaikan target investasi hampir tiga kali lipat tersebut didasarkan proyek-proyek strategis yang ada di Kalimantan Utara seperti Proyek Strategi Nasional (PSN) Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan, serta proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan Hydro Power Mentarang di Kabupaten Malinau. Realisasi investasi di Kalimantan Utara pada 2017 mencapai Rp2,3 triliun, 2018 sebesar Rp2,2 triliun, 2019 sebesar Rp7,6 triliun, 2020 Rp3,2 triliun, 2021 sebesar Rp5,7 triliun, dan 2022 mencapai Rp13,7 triliun. **BIRO ADPIM**



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA



PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI KALIMANTAN UTARA

SEMESTER I 2023

BULUNGAN

Rencana
Rp9,4 triliun
Realisasi
Rp2,4 triliun

Sektor Primer : 57 proyek
Sektor Sekunder : 47 proyek
Sektor Tersier : 107 proyek
Tenaga Kerja Indonesia : 1.318 orang
Tenaga Kerja Asing : 34 orang

MALINAU

Rencana
Rp2,9 triliun
Realisasi
Rp612,4 miliar

Sektor Primer : 55 proyek
Sektor Sekunder : 7 proyek
Sektor Tersier : 57 proyek
Tenaga Kerja Indonesia : 240 orang
Tenaga Kerja Asing : 7 orang

NUNUKAN

Rencana
Rp4,2 triliun
Realisasi
Rp1,7 triliun

Sektor Primer : 44 proyek
Sektor Sekunder : 17 proyek
Sektor Tersier : 53 proyek
Tenaga Kerja Indonesia : 849 orang
Tenaga Kerja Asing : 1 orang

TANA TIDUNG

Rencana
Rp3,1 triliun
Realisasi
Rp1,1 triliun

Sektor Primer : 18 proyek
Sektor Sekunder : 1 proyek
Sektor Tersier : 7 proyek
Tenaga Kerja Indonesia : 147 orang
Tenaga Kerja Asing : 3 orang

KALIMANTAN UTARA

Rencana : Rp34,2 triliun Realisasi : Rp8,7 triliun

- Sektor Primer : 194 proyek
- Sektor Sekunder : 103 proyek
- Sektor Tersier : 518 proyek
- Tenaga Kerja Indonesia : 3.722 orang
- Tenaga Kerja Asing : 51 orang

Sumber: DPMP-TSP Kalimantan Utara

TARAKAN

Rencana
Rp14,3 triliun
Realisasi
Rp2,87 triliun

Sektor Primer : 1 proyek
Sektor Sekunder : 41 proyek
Sektor Tersier : 280 proyek
Tenaga Kerja Indonesia : 1.171 orang
Tenaga Kerja Asing : 11 orang



BIRO ADPIM KALTARA

Berfokus pada Ekonomi Hijau



Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.M.Hum menanam pohon sebagai salah satu upaya konkret dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, salah satunya upaya pembangunan lingkungan kabupaten/kota melalui Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE).

"Ini pun telah menjadi perhatian dunia selain upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta pengamanan kebakaran hutan dan lahan," kata Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor.

Pada 2023 ini adalah tahun keempat program TAPE Kalimantan Utara (TAPE KU) berjalan. Transfer fiskal ini untuk menjaga dan meningkatkan perbaikan lingkungan di daerah.

Skema TAPE merupakan reformasi atas penyaluran dana bantuan keuangan/hibah dari provinsi kepada kabupaten/kota. Penyaluran dana disertai pertimbangan atas rencana kabupaten/kota yang mendukung pelestarian lingkungan dan fungsi-fungsi ekologi.

Kalimantan Utara menjadi provinsi pertama yang menerapkan instrumen ini. Ada beberapa tahap pelaksanaan program ini, dimulai dari persiapan masing-masing kabupaten/kota juga bisa melakukan *self-assessment* untuk memperkirakan skor atau nilai yang dapat diperoleh.

Alokasi total TAPE ditentukan oleh pemerintah provinsi dan pagu bagi masing-masing kabupaten/kota akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas usulan yang diajukan ke provinsi.

Beberapa kriteria dan indikator disusun untuk membantu penentuan besar dana bantuan yang akan diterima oleh masing-masing kabupaten/kota.

Ada lima kriteria penilaian skema program ini yaitu Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Area Penggunaan Lain (APL), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pengelolaan Persampahan, Perlindungan Air, dan Pencemaran Udara.

"Dari lima indikator itu terdapat 17 item turunan yang harus diperbaiki," kata Gubernur Kalimantan Utara.

Pada 2023, Pemprov Kalimantan Utara menyalurkan kurang lebih Rp7 miliar bantuan TAPE kepada Pemkab/Pemkot berdasarkan perankingan hasil penilaian indikator.

Kabupaten Nunukan paling teratas dan diberi bantuan Rp1,56 miliar. Disusul Kota Tarakan Rp1,51 miliar, Kabupaten Bulungan Rp1,48 miliar,

Kabupaten Malinau Rp1,32 miliar, dan Kabupaten Tana Tidung Rp1,13 miliar.

Untuk diketahui, di Kalimantan Utara juga sedang berlangsung pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kabupaten Bulungan. Energi listrik kawasan industri hijau itu disuplai dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk di Kabupaten Malinau.

Proyek itu kawasan industri itu telah groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Desember 2021. Kemudian pada 1 Maret 2023, Presiden juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan PLTA Mentarang Induk. **BIRO ADPIM**

ALOKASI ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BERBASIS EKOLOGI PROVINSI KALIMANTAN UTARA (TAPE KU) 2023

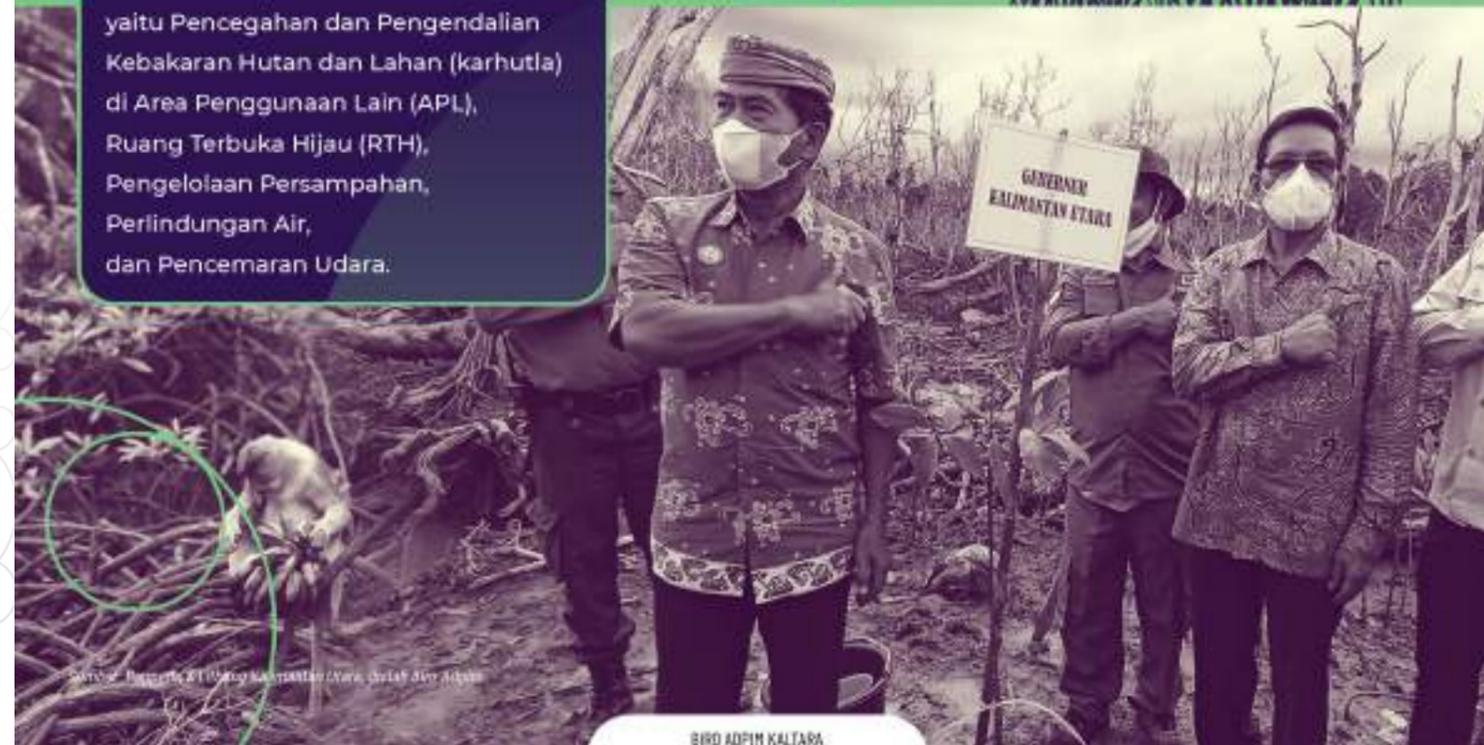
(Keputusan Gubernur Nomor 188.44/K.16/2023)



TAPE merupakan reformasi atas penyaluran dana bantuan keuangan/hibah dari provinsi kepada kabupaten/kota. Penyaluran dana disertai pertimbangan atas rencana kabupaten/kota yang mendukung pelestarian lingkungan dan fungsi-fungsi ekologi.

Transfer fiskal ini untuk menjaga dan meningkatkan perbaikan lingkungan di daerah.

Lima kriteria penilaian skema program ini yaitu Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Area Penggunaan Lain (APL), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pengelolaan Persampahan, Perlindungan Air, dan Pencemaran Udara.



BEC Dorong Kemajuan Kalimantan



Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang berbicara dengan dua delegasi negara ASEAN pada Borneo Business Roundtable rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023, di Jakarta, 5 September 2023. BIRO ADPIM

Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang meminta agar kesepakatan *Borneo Economic Community (BEC)* atau Masyarakat Ekonomi Kalimantan memberi dampak kemakmuran dan kemajuan bagi Pulau Kalimantan.

"Kami mengapresiasi kerja sama ini dan meminta agar membawa dampak kemajuan bagi Pulau Kalimantan," ujar Zainal A Paliwang.

Sebelumnya, pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023, Gubernur Zainal A Paliwang turut menghadiri *Borneo Business Roundtable* di Jakarta pada 5 September 2023.

Borneo Business Roundtable merupakan forum inisiatif *ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC)* Indonesia dan Brunei Darussalam untuk mendorong perdagangan dan investasi di Kalimantan, Sabah, Sarawak, dan Labuan.

Ketua ASEAN-BAC Indonesia, M Arsjad Rasjid, membuka forum yang dihadiri oleh Ketua ASEAN-BAC Brunei Darussalam, Puan Haslina Taib, dan Deputi Investasi dan Pendanaan Otorita IKN (OIKN), Agung Wicaksono.

Forum sepakati kerja sama sektor privat di Kalimantan, Sabah, Sarawak, Labuan, dan Brunei Darussalam, membentuk *Borneo Economic Community (BEC)*.

"Kita sudah menyepakati kerja sama bersama *private sector*. Kesepakatan ini membuat yang namanya *Borneo Economic Community*," kata Arsjad.

Pada forum tersebut juga diungkit rencana perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Kalimantan Timur, yang dinamai IKN Nusantara.

Menurutnya, perpindahan ibu kota negara itu ke Kalimantan merupakan hal yang tidak bisa diabaikan oleh Pemerintah Daerah di sekitarnya, termasuk Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki banyak potensi besar untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat.

Arsjad menjelaskan bahwa IKN yang akan diresmikan pada 17 Agustus 2024, bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Ke-79 Republik Indonesia akan menjadi ibu kota masa depan. IKN direncanakan sebagai kota yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan.

"Hari ini kita akan mendalami topik-topik yang krusial. Kita akan memperoleh wawasan tentang Nusantara, yang akan diresmikan di 2024. Kita ingin agar ibu kota negara ini bisa menjadi berkah bagi kita dan negara-negara tetangga serta negara mitra bisnis kita," katanya di Jakarta.

Untuk diketahui, BEC tidak berhenti hanya pada momen KTT ASEAN. Kerja sama itu akan segera dilanjutkan bersama pemangku kepentingan lainnya pada November di Pontianak, Kalimantan Barat sebagai wujud keseriusan dalam pembangunan ekonomi Pulau Kalimantan.

ASEAN-BAC dirancang untuk mempertemukan para pemangku kepentingan di Kalimantan dalam upaya menumbuhkan perdagangan intra-

Kalimantan dan menarik investasi asing langsung.

Selain membahas IKN Nusantara dan BEC, forum itu juga melakukan peluncuran atau launching pendaftaran minat ke Dagang *Borneo Digital Marketplace*.

Dia menjelaskan Kalimantan adalah pulau terbesar di Asia dan terbesar ketiga di dunia. Dengan jumlah penduduk sekitar 24 juta jiwa, terdapat potensi yang signifikan untuk meningkatkan perdagangan di kota-kota di tiga negara yang mendiami pulau tersebut, yaitu di Brunei, Kalimantan, Labuan, Sabah, dan Sarawak.

Formalisasi komunitas di Borneo, katanya, juga akan menjadi sesuatu yang sentral untuk memastikan bahwa prioritas-prioritas dan *legacy project* ASEAN tetap diusung, mulai dari transformasi digital sampai pembangunan berkelanjutan, perdagangan, investasi, dan lain-lain.

Borneo Business Roundtable tidak hanya dimotivasi oleh tujuan ekonomi semata, namun yang paling utama adalah mendorong Borneo agar secara cepat menjadi komponen utama untuk penghidupan masyarakat. **BIRO ADPIM**

Indikator Makro Kalimantan Utara



Perkembangan Makro Ekonomi

Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara triwulan II 2023 berdasarkan catatan Bank Indonesia, tumbuh positif meskipun mengalami moderasi jika dibandingkan dengan triwulan I 2023.

Kinerja positif pertumbuhan ekonomi didorong oleh kinerja Lapangan Usaha (LU) Konstruksi dan LU Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. LU Konstruksi secara konsisten melanjutkan tren peningkatan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan sejumlah proyek strategis nasional dan daerah di Kalimantan Utara, seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), Pembangunan Jalan Perbatasan Malinau-Krayan, dan empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan Pabrik Kertas.

Sedangkan pertumbuhan pada LU Perdagangan disebabkan oleh tingginya demand sejalan dengan momen HBKN Idul Fitri dan Idul Adha. Namun demikian, pertumbuhan perekonomian Kalimantan Utara lebih tinggi tertahan oleh melambatnya kinerja LU Pertambangan yang memiliki pangsa terbesar pada struktur perekonomian Kalimantan Utara. Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan demand global terhadap komoditas batu bara yang tercermin dari berlanjutnya tren Harga Batubara Acuan (HBA) yang juga menurun, serta sejalan dengan tren normalisasi demand pada awal tahun.

Dari sisi permintaan, kinerja positif perekonomian Kalimantan Utara terutama didukung oleh kinerja Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) seiring dengan akselerasi realisasi investasi di Kalimantan Utara dan Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya seiring dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang meningkat sejalan dengan optimisme terhadap kondisi perekonomian yang semakin membaik.

Di sisi lain, kinerja PDRB tumbuh lebih tinggi tertahan disebabkan kinerja ekspor yang

termoderasi sejalan dengan pelemahan demand global terhadap komoditas batu bara.

Keuangan Pemerintah Daerah

Pada triwulan II 2023 realisasi belanja di Provinsi Kalimantan Utara tercatat lebih tinggi dibanding dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya, yang didukung khususnya oleh peningkatan realisasi belanja modal dan belanja operasional sejalan dengan akselerasi proyek infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara termasuk proyek strategis daerah dan peningkatan aktivitas pegawai Pemerintah.



Kondisi ini sejalan dengan realisasi belanja di Kabupaten/Kota yang juga mengalami peningkatan hampir di setiap Kabupaten/Kota. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi Pendapatan Provinsi Kalimantan Utara secara nominal tercatat tumbuh meningkat, meskipun secara persentase sedikit lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, peningkatan secara nominal tersebut sejalan dengan anggaran pendapatan yang juga mengalami peningkatan.

Di sisi lain, realisasi pendapatan Kabupaten/Kota secara agregat meningkat di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara, seiring dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang terus membaik di tengah mobilitas yang meningkat.

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Gabungan dua Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu Kota Tarakan dan Tanjung Selor pada triwulan II 2023 tercatat mengalami inflasi sebesar 2,91% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 4,17%(yoy) dan berada di dalam sasaran inflasi nasional.

Penurunan tekanan inflasi ini terutama didorong oleh terkendalinya tekanan pada kelompok makanan, minuman dan tembakau seiring dengan masuknya musim panen dan terlaksananya program Gerakan Pengendalian

Inflasi Pangan (GNPIP) sehingga dapat menjaga ketahanan pasokan pada sejumlah komoditas pangan strategis.

Di sisi lain, tekanan inflasi pada kelompok transportasi terjadi seiring dengan meningkatnya demand masyarakat pada HBKN Idul Fitri dan Idul Adha di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat pasca pencabutan status pandemi pada triwulan II-2023.

Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Sejalan dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang tetap bertumbuh positif, penyaluran kredit tercatat tetap tumbuh kuat meskipun tidak sekuat periode sebelumnya. Tetap kuatnya pertumbuhan kredit pada triwulan laporan terutama didukung oleh peningkatan pertumbuhan kredit investasi sejalan dengan proyek-proyek strategis nasional yang sedang diakselerasi di Kalimantan Utara.

Di sisi lain, kredit konsumsi dan kredit modal kerja tumbuh terbatas dipengaruhi berakhirnya berbagai stimulus kehati-hatian perbankan.

Pertumbuhan positif penyaluran kredit juga didorong dari sektor UMKM. Penyaluran Kredit UMKM tercatat memiliki pangsa 30,83 persen melebihi sasaran penyaluran kredit nasional.

Peningkatan pertumbuhan kredit tersebut juga diiringi dengan *Non-Performing Loan (NPL)* yang tetap terjaga.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi Ketenagakerjaan Kalimantan Utara menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana tercermin dari meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dari berbagai LU serta peningkatan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dari Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan tren penurunan sejak dua semester sebelumnya.

Tingkat kesejahteraan juga mengalami perbaikan sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan dimana pada Maret 2023 mencapai 6,45%, turun dibandingkan dengan periode Maret 2022 yang mencapai 6,77%. Perbaikan tingkat kesejahteraan juga tergambar dari perbaikan kesejahteraan petani melalui peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat 4,12% (yoy) pada Juni 2023 termasuk nilai tukar nelayan.

Meniti Kemandirian Fiskal dari PAD



Ilustrasi - Pelayanan Samsat Keliling Pemprov Kalimantan Utara untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diharapkan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Daerah diberi kewenangan untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sebagai provinsi yang berusia 11 tahun, pembangunan daerah ini turut dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

"Kami tidak ingin terus menerus menggantungkan dana transfer Pemerintah Pusat untuk membiayai pembangunan, tetapi berupaya untuk selalu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar tercipta kemandirian fiskal," tutur Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum.

Sejauh ini, Pendapatan Asli Daerah digunakan

untuk membiayai pembangunan berbagai sektor seperti pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas lainnya.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan memungut lima jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Sejauh 2023 ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah memperoleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp619,3 miliar dari target Rp791,5 miliar (78,24%).

Gubernur mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah memberikan perluasan jenis pajak yang dipungut Pemerintah Provinsi, yaitu Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

"Tambahkan dua jenis pajak itu akan mulai diterapkan pada Januari 2024, dan saat ini Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedang menyusun Rancangan Perda-nya, kemudian akan ada Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaannya," tutur Gubernur.

Demi suksesnya pembangunan daerah, Gubernur mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Utara agar berpartisipasi aktif dan taat melaksanakan

kewajiban membayar pajak daerah.

"Kami juga mendorong agar organisasi perangkat daerah terus mengidentifikasi, berinovasi, dan mencari sumber-sumber pendapatan daerah dari retribusi," tutur dia.

Gubernur juga memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan baik melalui pengawasan internal maupun pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). **BIRO ADPIM**

REALISASI RINCIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH AGUSTUS 2023

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Target	Realisasi	Persentase
Rp791,5 miliar	Rp619,3 miliar	78,24%

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :

Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD yang Sah
Target : Rp548,05 miliar	Target : Rp7,80 miliar	Target : Rp37,08 miliar	Target : Rp198,6 miliar
Realisasi : Rp450,08 miliar	Realisasi : Rp14,03 miliar	Realisasi : Rp10,11 miliar	Realisasi : Rp145,1 miliar
Persentase : 82,12%	Persentase : 179,8%	Persentase : 27,27%	Persentase : 73,06%

Pajak Daerah terdiri atas :

<p>Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Target : Rp90 miliar Realisasi : Rp58,7 miliar Persentase : 65,27</p>	<p>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Target : Rp96 miliar Realisasi : Rp80,04 miliar Persentase : 83,38%</p>	<p>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Target : Rp300 miliar Realisasi : Rp275 miliar Persentase : 91,78%</p>
<p>Pajak Air Permukaan (PAP) Target : Rp3,3 miliar Realisasi : Rp2,08 miliar Persentase : 62,71%</p>	<p>Pajak Rokok Target : Rp58,7 miliar Realisasi : Rp33,8 miliar Persentase : 57,6%</p>	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat penambahan dua jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

Pemprov Kalimantan Utara bersama DPRD sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang terbaru, menyusul terbitnya kewenangan baru sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Peraturan Daerah yang baru akan diimplementasikan mulai Januari 2024.

Sumber: Bependa Kalimantan Utara, Biro Adpim



Penyertaan Modal Gerakkan Perekonomian



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2023 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bankaltimtara dihadiri Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, Gubernur Kaltim Isran Noor, Direktur Utama Bankaltimtara Muhammad Yamin, Komisaris Utama, Zainuddin Fanani, serta Bupati/Walikota se-Kaltim dan Kaltara, 10 Agustus 2023 di Kota Balikpapan. BIRO ADPIM

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berusaha menambah sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian. Salah satu upaya dilakukan adalah penyertaan modal.

Tahun 2023 merupakan tahun kelima penyertaan modal dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur - Kalimantan Utara atau Bankaltimtara.

Penyertaan modal pada 2023 ini telah mencapai Rp235 miliar, dengan jumlah dividen terakhir (2022) yang telah diterima mencapai Rp57,5 miliar. Dividen adalah bagian keuntungan/laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham berupa uang tunai/kas.

Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum mengatakan dividen yang didapatkan dari penyertaan modal pada Bankaltimtara dimasukkan dalam komponen pendapatan asli daerah dan dibelanjakan untuk program dan kegiatan seperti belanja barang jasa, belanja modal, dan belanja pegawai.

Pemprov Kalimantan Utara mulai menyertakan modal pada Bankaltimtara pada 2016 dengan nilai modal disetor sebesar Rp150 miliar. Pada 2018 menjadi Rp170 miliar, pada 2019 menjadi Rp190 miliar.

Pada 2021 penyertaan modal bertambah menjadi Rp205 miliar. Lalu ditambah menjadi Rp220

miliar pada 2022. Pada 2023 ini penyertaan modal telah ditambah sehingga telah mencapai Rp235 miliar.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah salah satu pemegang saham Bankaltimtara dengan modal setor mencapai Rp235 miliar. Pemprov Kalimantan Timur adalah Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan modal disetor paling tinggi, yakni telah mencapai Rp1,9 triliun (hingga Juli 2023).

Selain diharapkan mendatangkan pendapatan asli daerah, penyertaan modal juga akan meningkatkan geliat perekonomian daerah, melalui pemberian kredit atau pinjaman pada kegiatan usaha masyarakat, terutama untuk sektor usaha kecil dan menengah (UKM) ke atas.

Bankaltimtara merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

Mulai resmi beroperasi pada 14 Oktober 1965, diresmikan oleh Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Timur A. Moeis Hasan, dengan payung hukum Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 3/PD/64 tertanggal 19 September 1964 yang mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Nomor 9/10/8-45 tertanggal 1 April 1965, dan Izin Usaha dari

Menteri Urusan Bank Sentral/ Bank Indonesia No.Kep. 95/PBS/65 tanggal 21 September 1965.

Misi awal pendiriannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah adalah sebagai Agen pembangunan daerah, dengan maksud untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Sesuai anggaran dasar, bank didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah, PT. BPD Kaltim Kaltara bertugas sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah; pemegang dan/atau penyimpanan uang daerah; serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. **BIRO ADPIM**

Daftar Penyertaan Modal dan Dividen Pemprov Kalimantan Utara pada Bankaltimtara

2016	2017	2018	2019	2020
Modal disetor Rp150 miliar	Modal disetor Rp-	Modal disetor Rp20 miliar	Modal disetor Rp150 miliar	Modal disetor Rp-
Jumlah Modal disetor Rp150 miliar	Jumlah Modal disetor Rp150 miliar	Jumlah Modal disetor Rp170 miliar	Jumlah Modal disetor Rp190 miliar	Jumlah Modal disetor Rp190 miliar
Dividen Rp32,5 juta	Dividen Rp11,2 miliar	Dividen Rp11,4 miliar	Dividen Rp7,4 miliar	Dividen Rp8,2 miliar
Jumlah Dividen Rp32,5 juta	Jumlah Dividen Rp11,3 miliar	Jumlah Dividen Rp22,7 miliar	Jumlah Dividen Rp30,1 miliar	Jumlah Dividen Rp38,3 miliar



2021	2022	2023
Modal disetor Rp15 miliar	Modal disetor Rp15 miliar	Modal disetor Rp15 miliar
Jumlah Modal disetor Rp205 miliar	Jumlah Modal disetor Rp220 miliar	Jumlah Modal disetor Rp235 miliar
Dividen Rp9,08 miliar	Dividen Rp10,1 miliar	Dividen Rp-
Jumlah Dividen Rp47,4 miliar	Jumlah Dividen Rp57,5 miliar	Jumlah Dividen Rp-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara salah satu pemegang saham Bankaltimtara dengan modal setor mencapai Rp235 miliar. Pemprov Kalimantan Timur adalah Pemerintah Daerah dengan modal disetor paling tinggi, yakni telah mencapai Rp1,9 triliun (hingga Juli 2023).

Bankaltimtara merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas.



Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin (enam kiri), Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum (lima kiri) dan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.si (lima kiri) berfoto bersama setelah pelantikan KDEKS Kalimantan Utara di Sebatik, Kabupaten Nunukan pada 3 Agustus 2023.

Kekuatan Baru dari Keuangan Syariah

Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin juga selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menyatakan bahwa ekonomi dan keuangan syariah berpotensi besar menjadi sumber pertumbuhan baru yang akan makin memperkuat ketahanan ekonomi wilayah Kalimantan Utara.

Kedua, untuk menumbuhkan dan memperkuat sektor prioritas rantai nilai halal seperti pertanian, makanan minuman halal, fesyen muslim dan pariwisata ramah muslim di wilayah Kalimantan Utara.

Ketiga, untuk meningkatkan literasi yang saat ini kurang lebih baru 23,3 persen.

"Melalui berbagai upaya tersebut, Provinsi Kalimantan Utara diharapkan menjadi etalase terdepan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Timur Indonesia," ujar Wakil Presiden.

Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum mengungkapkan kehadiran KDEKS diharapkan perekonomian Kalimantan Utara menjadi lebih kuat, terkhusus di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

"Hal ini adalah momentum untuk memicu semangat para pemimpin dalam memimpin di daerah, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah," kata Zainal.

KDEKS Kalimantan Utara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.41 Tahun 2023 ini merupakan KDEKS ke-22 yang

sudah ada di Indonesia.

KDEKS dibentuk sebagai katalisator percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah dalam bentuk lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat *ad hoc*.

Untuk diketahui, KNEKS mengukuhkan pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalimantan Utara di hadapan Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Harian KNEKS pada Kamis (3/8) di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan.

Penguatan dilakukan oleh Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara, Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen, serta jajaran pimpinan instansi dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Utara.

Turut hadir pula perwakilan dari Kantor Vertikal Kementerian/Lembaga Anggota KNEKS di Kalimantan Utara, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Majelis Ulama Indonesia, Institusi dan Lembaga *stakeholder* ekonomi dan keuangan syariah Provinsi Kalimantan Utara, serta sivitas akademika, asosiasi praktisi dan organisasi masyarakat terkait. **BIRO ADPIM**

Onboarding di Ekosistem Digital



Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum (lima kiri) dan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.si (tiga kiri) memperlihatkan produk UMKM pada pembukaan Gernas BBI di Tanjung Selor, Bulungan pada 20 Mei 2023.

Total transaksi penjualan UMKM selama pelaksanaan Gernas BBI dan BBWI di Kalimantan Utara mencapai Rp69,6 miliar. Selain itu terdapat 785 onboarding pada sistem ekonomi digital.

Adapun komitmen belanja APBD untuk penggunaan produk dalam negeri (PDN) mencapai Rp1,04 triliun. Adapun total pembiayaan UMKM mencapai Rp2,5 miliar, jumlah kunjungan wisatawan 326 ribu orang.

Gernas BBI dan BBWI di Kalimantan Utara bertajuk "Pesona Pandurata: Ayo Bah..!! Kita Belanja dan Jelajah Kalimantan Utara" sebelumnya telah diluncurkan pada 21 Mei 2023 di Tanjung Selor. **BIRO ADPIM**

Pada 20 Agustus 2023, Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum meluncurkan Festival Karya Kreatif Benuanta di Kota Tarakan, sebagai puncak Panen Gerakan Nasional (Gernas) Bangsa Buatan Indonesia (BBI) dan Bangsa Berwisata di Indonesia (BBWI) di Kalimantan Utara.

Karya Kreatif Benuanta adalah persembahan kontribusi nyata Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Bank Indonesia, dan instansi terkait lain untuk semakin memasyarakatkan Gernas BBI dan BBWI. Gernas BBI dan BBWI turut berpartisipasi dalam pengendalian inflasi Nasional dan Daerah.

Festival Karya Kreatif Benuanta diyakini meningkatkan sektor riil khususnya UMKM dan ekonomi kreatif yang telah memberi kontribusi besar bagi penguatan ekonomi Nasional dan Kalimantan Utara secara khusus.

Sejak diluncurkan di Tanjung Selor pada 21 Mei 2023 dengan tajuk "Pesona Pandurata: Ayo Bah..!! Kita Belanja dan Jelajah Kalimantan Utara", gerakan itu telah mencatat transaksi penjualan UMKM sebesar Rp69,6 miliar.

Kampanye Gernas BBI dan BBWI dalam Festival Karya Kreatif Benuanta menghadirkan para pelaku UMKM dan pariwisata unggulan yang menghasilkan berbagai produk unggulan yang berciri khas Kalimantan Utara, baik binaan Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, maupun *stakeholder* lainnya.

Gubernur menyebut, Festival Karya Kreatif Benuanta adalah waktu paling tepat untuk berbelanja dan mengeksplorasi berbagai hal sebagai wujud rasa cinta kita terhadap produk lokal dan pariwisata Kalimantan Utara.

Festival ini terselenggara atas sinergi dan kolaborasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selaku *campaign manager*, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *co-manager*, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kalimantan Utara, forkopimda, asosiasi swasta lainnya.

Gubernur menyatakan penggunaan produk-produk lokal dari pelaku UMKM lokal Kalimantan Utara dalam tiga tahun terakhir ini menjadi *trendsetter fashion* baik pada kalangan aparatur sipil negara maupun fashion enthusiast lainnya di Kalimantan Utara.

Gerakan ini akan terus didorong demi meningkatkan penggunaan produk-produk UMKM serta efek positif bagi industri pariwisata dari hulu hingga hilir.

Untuk diketahui, kegiatan yang dilangsungkan di Pangkalan Udara (Lanud) Anang Busra, pada 19-20 Agustus 2023 turut dihadiri pejabat Pusat seperti Usman Kansong Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI, Odo RM Manuhutu Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves RI, Destry Damayanti Deputi



Dua Ribu NIB Baru



Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.M.Hum (lima kiri) dan Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kominfo RI Usman Kansong (tiga kiri) berfoto bersama pelaku UMKM pada puncak Gernas BBI dan BBWI di Kota Tarakan 19 Agustus 2023.

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) RI bekerja sama kementerian/ lembaga telah menerbitkan 2.000 Nomor Induk berusaha (NIB) bagi UMKM di Kalimantan Utara, dan akan terus berkolaborasi dan memberi pendampingan pada sistem *Online Single Submission (OSS)*.

“Kolaborasi ini kami lakukan bersama kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah,” kata Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo RI di Tarakan, Agustus 2023.

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dimaksud ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat- obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Pemprov Kalimantan Utara, dan Bank Indonesia Kalimantan Utara melalui forum digital pada Maret 2023.

Kerja sama itu dapat melahirkan hampir dua ribu NIB baru bagi pelaku UMKM Kalimantan Utara. Selain itu berkait kontribusi Kemenkominfo RI dan kolaborasi Kementerian/Lembaga dan dan Pemerintah Daerah selama tiga tahun terakhir, saat ini onboarding UMKM ke ruang digital sudah mencapai sekitar 22 juta dan semakin mendekati target 30 juga UMKM *onboarding* pada 2024.

“Karena gerakan BBI memiliki misi untuk pemanfaatan teknologi digital bagi produk-produk artisan lokal, maka Kemenkominfo akan terus mendukung melalui pembangunan infrastruktur digital dan ekosistem digital termasuk pendampingan UMKM secara digital,” kata Usman Kansong.

Kemenkominfo RI juga selalu berusaha mempercepat akselerasi konektivitas digital,

pembangunan signal 4G, serta infrastruktur akses internet di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta lokasi-lokasi layanan publik.

Usaha-usaha lainnya yang dilakukan antara lain mendorong Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam membeli dan menggunakan produk dalam negeri (PDN). Alokasinya pun cukup besar yakni 40 persen dari anggaran belanja melalui E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Usman Kansong menyebutkan, saat ini realisasi belanjanya telah mencapai Rp700 triliun lebih atau sekitar 76,2 persen. Dan khusus Provinsi Kalimantan Utara saat ini, realisasi terhadap perencanaan PDN telah mencapai Rp431 miliar atau 35,65 persen.

“Semoga setelah *harvesting* BBI Kalimantan Utara, angka realisasi PDN Kalimantan Utara bisa terus bertambah,” ujar dia.

Ia menyatakan, Kemenkominfo RI melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas utama sebagai pengampu *government public relation* atau GPR. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban untuk selalu mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) melalui serangkaian aktivitas komunikasi yang bertujuan mengenalkan gerakan ini kepada masyarakat luas.

“Pada tahun ini media handling yang telah kami lakukan antara melakukan serangkaian dialog di televisi nasional TVRI dan Kompas TV dengan Kemenkominfo RI, Pemprov Kalimantan Utara, dan BI sebagai narasumber,” ujarnya.

Ia menyatakan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo RI juga memasang alat peraga komunikasi luar ruang di kota-kota besar serta berkoordinasi dengan TVRI, RRI, ANTARA, dan media massa lain untuk sosialisasikan Gernas BBI Kalimantan Utara kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Selamat kepada Pemprov dan BI Kalimantan Utara atas acara yg luar biasa ini, semoga dapat berdampak positif bagi eksistensi pelaku UMKM, produk lokalnya, serta tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi provinsi secara umum,” ujarnya.

Untuk diketahui, Usman Kansong memberi sambutan pada peluncuran *Harvesting/Panen* Gernas BBI dan BBWI Kalimantan Utara yang diselenggarakan di Pangkalan Udara (Lanud) Anang Busra, Kota Tarakan 20 Agustus 2023.

Ia menyatakan, pada awal 2020 Indonesia dan seluruh negara di dunia mengalami masa kelim saat COVID-19 menyerang, semua sektor terkena dampaknya utamanya sektor ekonomi dan bisnis.

Salah satu pihak yang paling terdampak adalah sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) utamanya sektor kriya, wastra, dan kuliner, dan fashion secara umum.

Oleh karena itu, Pemerintah mengambil inisiatif untuk meluncurkan Gernas BBI. Gernas BBI diluncurkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020. Gernas BBI bertujuan mendorong penguatan branding atau jenama, mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai produk dalam negeri sekaligus mengajak UMKM agar beralih ke ruang digital atau *onboarding*.

Gerakan ini merupakan kolaborasi masif yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, *E-Commerce*, serta organisasi dan asosiasi di bidang UMKM.

Kemenkominfo RI sebelumnya telah sukses menjadi campaign manager di dua provinsi yakni Kilau Digital Permata Flobamora Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Juni 2021, serta Binar Digital Papua di Jayapura pada Agustus 2022.

“Dan pada 2023, Kemenkominfo berperan sebagai *co-campaign manager* untuk Gernas BBI di Provinsi Kalimantan Utara yang bertajuk Menyatu dalam Harmoni Benuanta,” demikian Usman Kansong. **BIRO ADPIM**

Nilai di Balik Keanggunan



Batik lokal Kaltara dengan ragam motif dan warna yang indah dan memikat.

Diadaptasi dari Tradisi

Kalimantan Utara dikenal karena keindahan ornamen batiknya. Tetapi, tradisi batik sudah ada sejak lampau dan akhir-akhir ini dikembangkan pengrajin setempat. Rancangan yang ada, diadaptasi dari hiasan dan tradisi budaya suku Dayak, Bulungan, dan Tidung. Motif-motif ini menggambarkan pelajaran hidup, nilai falsafah, dan kearifan lokal yang ada. Batik umumnya dibuat dengan menggunakan bahan dan warna alami serta sangat ramah lingkungan.

Warisan Alam

Kekayaan flora dan fauna di Kalimantan Utara menginspirasi lahirnya corak-corak batik yang menawan Kalimantan Utara, baik dari Bulungan, Malinau, Tarakan, Nunukan, maupun Tana Tidung. Batik pada umumnya dikenakan pada acara-acara sosial yang bersifat formal. Batik ini juga digunakan sebagai hadiah untuk menunjukkan niat baik dan memberi selamat antara rekan kerja, keluarga, dan kawan.

Motif Bunga Raye

Motif Bunga Raye melambangkan kesatuan antara suku Dayak, Bulungan, dan Tidung, sehingga bermakna persatuan di balik perbedaan. Motif ini juga menggambarkan harapan akan keselamatan dan kesembuhan dari segala penyakit.

Motif Bultiya

Batik Bultiya adalah akronim dari Batik Bulungan, Tidung, dan Dayak. Batik ini sudah cukup terkenal di wilayah Kalimantan Utara. Selain motif batik yang menarik dan elegan, batik Bultiya menggambarkan filosofi dan nilai sejarah tiga suku yang tinggal di Kalimantan Utara.

Secara singkat, motif batik ini dirancang oleh Ainun Farida dan Ridwansyah. Meskipun ditolak berkali-kali, dia gigih mengkomunikasikan desain ciptaannya dengan bupati dan para pemimpin tiga suku. Akhirnya desainnya diterima dan menjadi kebanggaan wilayah ini.

Ia menciptakan motif ini untuk menghargai dan membantu memperkuat hubungan serasi antar suku di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Motif Dayak Tahol

Motif Dayak Tahol merupakan pola khas berupa empat garis lengkung dan titik-titik. Motif ini melambangkan perisai, yang merupakan simbol daya tahan dan keutuhan di masyarakat.

Motif Bekantan Pakis

Motif ini menggambarkan Pakis Haji (*Polystichum Setiferum*), tanaman pakis asli di Kalimantan Utara, dan Bekantan, monyet Kalimantan langka yang berhidung besar.

Tanaman pakis melambangkan umur panjang dan keabadian. Bekantan digambarkan sebagai usaha membantu pelestariannya.

Lulantibu

Corak batik ini adalah khas Kabupaten Nunukan. Batik Lulantibu merupakan nama corak batik yang berasal dari penggabungan 4 suku dayak di Kabupaten Nunukan masing-masing Dayak Lundayeh, Dayak Tagalan, Dayak Tahol, Tidung, dan Bulungan.

Filosofi Bhineka Tunggal Ika yang menjadi falsafah NKRI, selalu dijunjung tinggi dalam setiap corak yang terlukis pada batik Lulantibu.



Beras Adan dalam kemasan.

Adan, Si Pulen Aromatik dari Perbatasan

Allah Yang Maha Kuasa menganugerahi Kalimantan Utara kekayaan alam yang cukup beragam dan unik, yang tidak dimiliki daerah lain di Tanah Air. Salah satunya adalah Beras Adan, beras organik yang tumbuh subur dan kecintaan petani-petani tradisional di Krayan, Kabupaten Nunukan.

Rasanya legit manis, tekstur pulen, dan aromatik menjadikan beras endemik Krayan ini favorit banyak orang. Karena organik, beras ini pun memberikan pengalaman konsumsi nasi yang berbeda dari nasi biasanya.

Tak salah jika pemimpin Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah adalah konsumen setia Beras Adan. Terdapat tiga jenis Beras Adan Krayan yang diunggulkan yaitu putih, merah, dan hitam.

Beras Adan Krayan varietas hitam mempunyai serat halus dengan aroma dan cita rasa unik. Kadar mineral Ca (kalsium), P (fosfor) dan Fe (besi) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan varietas beras hitam standar. Kadar lemak rendah serta protein tinggi (9,3 persen).

Beras adan putih, merah dan hitam ini adalah makanan yang sehat. Zat dengan kuantitas tinggi yang terkandung di dalam beras adan Krayan varietas merah adalah vitamin B2, menunjukkan bahwa pilihan beras ini adalah pilihan beras sehat untuk keluarga.

Dengan keistimewaannya itu, pada Agustus 2023, Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A

Paliwang, SH.,M.Hum memperkenalkan Beras Adan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta.

Beras Adan juga banyak dikonsumsi penduduk Malaysia, karena secara geografis Krayan berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Beras ini bahkan sempat diakui Malaysia dan dijual dengan merek *Borneo Rice*.

Untuk itu, demi melindungi status beras adan Krayan agar tak diakui negara lain, beras ini sudah mengantongi sertifikat Indikasi Geografis (IG) dari Dirjen Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Republik Indonesia pada 9 Januari 2012.

Dalam acara peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, berinisiatif memperkenalkan kembali Beras Adan kepada publik.

Menanam Beras Adan tak bisa asal-asalan. Dari cara menanam, jarak tanam, hingga lama penyemaian cukup dijaga. Memberantas hama pun dilakukan dengan bahan alami. Tidak ada bahan kimia walau pupuk ataupun obat hama banyak tersedia.

Tata cara penanaman hingga panen dan penanganan pasca panen bersumber pada budaya leluhur Dayak Lundayeh yang masih dipertahankan hingga saat ini.

Saat menggiling beras adan krayan juga dilakukan tidak sembarangan. Padi harus digiling dan tak boleh patah. Ada orang-orang khusus yang diberi pelatihan untuk menggiling padi dengan baik.

Dahulu harga jual beras ini terbilang murah. Per kaleng ukuran 15 kilogram sekitar Rp200 ribu. Saat ini para petani dapat menjual harga beras 1 kaleng pada kisaran Rp400.000.

Komoditas Beras Adan kini tidak saja menjadi kebanggaan para petani di Krayan. Beras ini juga kebanggaan keberhasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pun terus mendorong komoditas Beras Adan masuk dalam ekosistem digital baik dalam *e-commerce* maupun *e-catalogue* Pemerintah. **BIRO ADPIM**



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA



Sekilas Beras Adan

Beras Adan adalah varietas lokal dan bagian dari warisan budaya masyarakat adat di dataran tinggi Krayan, Nunukan.

“

Beras Adan dibudidayakan dengan cara-cara tradisional dan alami oleh para petani Dataran Tinggi Krayan, ditanam dan dipanen sekali dalam satu tahun. Beras Adan Krayan (varietas putih) sudah memiliki Indikasi Geografis (GI) artinya varietas dari Krayan.

Beras adan Krayan disajikan untuk tamu dan di acara penting, dan bagian penting dari tradisi kuliner setempat (Luk Kenen Tau).

Tidak mengandung unsur kimia serta memiliki kandungan protein dan zat lainnya yang tinggi.

Varietas hitam proteinnya tinggi sedangkan kandungan lemaknya kurang.



Beras adan membantu perekonomian lokal karena semua hasil penjualan langsung untuk petani masyarakat adat di dataran tinggi Krayan. Harga jual beras di kota sudah harga premium untuk para petani. Beras adan menggunakan pola pertanian alami yang dipadukan dengan peternakan kerbau, dan memanfaatkan air jernih dari gunung untuk irigasi persawahan. Alam menjadi jaminan pertumbuhan padi yang baik dan sehat, dan tanaman padi dan siklus pertanian sudah sesuai dengan alam sekitar.



Garam Krayan, Padu Padan Nikmat dan Khasiat



Garam Krayan yang dikemas dalam daun.

Krayan merupakan salah satu daerah yang unik di Indonesia. Selain sebagai daerah terluar Indonesia yang sangat kaya adat istiadat dan budayanya, daerah ini juga diberi keunikan berupa kehadiran mata air asin yang oleh masyarakat setempat diolah menjadi garam.

Garam itu dihasilkan dari sumur air asin di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kurang lebih 900 meter di atas permukaan laut.

Daerah dataran tinggi ini dulunya diyakini adalah hamparan lautan. Lalu dari proses geologi yang cukup panjang terbentuklah dataran tinggi yang menyisakan banyak mata air asin.

Sudah sejak lama dan turun temurun masyarakat Krayan mengolah air asin dataran tinggi tersebut menjadi garam, yang oleh masyarakat setempat disebut Tucu'.

Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen TP menyebut, Garam Gunung Krayan berkhasiat tinggi dan telah menjadi konsumsi masyarakat Dayak Lundayeh di Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sejak ratusan tahun lalu.

"Dan satu hal yang pasti bahwa orang Krayan tidak ada gondok, itu artinya garam itu (Garam Gunung Krayan) mengandung yodium yang bagus," kata Yansen TP di Tanjung Selor.

Khasiat-khasiat garam endemik dataran tinggi Krayan itu menurutnya perlu dikaji lebih mendalam di laboratorium. Namun, sebagai konsumen Garam Krayan sejak lama, Yansen TP merasakan beberapa keunikan garam ini dibanding garam air laut yang diproduksi pada umumnya.

Olahan makanan seperti sayur-sayuran yang menggunakan Garam Krayan, mampu mempertahankan karakteristik warna sayur walau disimpan cukup lama. Misal, jika menggunakan garam pada umum, biasanya warna sayur berubah menjadi cokelat. Jika menggunakan garam gunung (Krayan), sayurnya akan tetap bertahan dengan warna hijau meski disimpan dalam jangka waktu beberapa hari. Jika olahan daging, tekstur daging akan empuk.

"Saya konsumsi garam ini sudah cukup lama, dan sampai sekarang masakan di rumah saya pakai Garam Krayan, dan kalau order, kebetulan saya punya keluarga yang memiliki sumur garam, jadi rutin saya ambil dalam jumlah besar supaya tetap ada di rumah," ungkap Wakil Gubernur.

Garam Krayan juga disebut berkhasiat menyembuhkan batuk-batuk jika dikonsumsi. Bahkan, katanya, bisa menjadikan umur panjang.

"Tetapi itu masih harus diuji, tetapi berkenaan tentang rasa, kenikmatan saya kira garam

gunung ini tidak bisa lagi diabaikan, memiliki cita rasa yang cukup tinggi dan berkhasiat luar biasa, jadi sangat layak jadi salah satu produk unggulan," ujarnya.

Ia juga menyebut air yang dihasilkan dari pengolahan air asin gunung Krayan memiliki kandungan yang baik dijadikan pupuk.

"Saya kira paling mendasar, bahwa garam gunung ini higienis dan cita rasanya juga alami, dan manfaatnya juga seperti makanan empuk dan tidak berubah warna, betul-betul nikmat," demikian Yansen TP.

Garam Krayan masih terus diproduksi sampai hari ini oleh masyarakat setempat. Dataran tinggi Krayan disebut memiliki 33 mata air asin. Dari jumlah itu terdapat empat mata air sumur garam yang memproduksi yaitu di Long Midang, Pa Kebuan Kecamatan Krayan Timur, Desa Long Layu Kecamatan Krayan Selatan, dan satu lagi di Kecamatan Krayan Barat.

Dalam sehari semalam, produksi Garam Krayan mampu mencapai 20 kilogram. Pengelolaannya dilakukan secara individu melalui kelompok. Artinya ada kelompok pengelola secara berjadwal. Semisal, satu kepala keluarga mengelola selama satu minggu, dan pada minggu selanjutnya dikelola kepala keluarga yang lain.

Dengan pola pengelolaan seperti itu, hampir seluruh masyarakat di sekitar tempat pengelolaan sebagian rezeki keberadaan sumur mata air garam.

Saat ini, masyarakat tengah gencar memperbaiki kemasan Garam Krayan menjadi lebih baik. Selain untuk menampung dan melindungi isi saat distribusi ke konsumen, juga berfungsi sebagai sarana pemasaran untuk mengundang daya tarik pembeli agar penjualan lebih meningkat.

Dulu garam siap jual dikemas dengan daun. Saat ini telah dikemas menggunakan kemasan yang menarik dan menampilkan kadar kandungan gizi.

Dalam mendukung kelancaran produksi Garam Krayan, Pemerintah telah memberikan bantuan pembangunan Pondok Garam di Krayan, termasuk bantuan peralatan mengolah dan memasak air garam sebelum menjadi kristal.

BIRO ADPIM

Sekilas Garam Gunung Krayan

Hingga saat ini terdapat **33 mata air garam di dataran tinggi Krayan (900 MDPL)**, namun tidak semuanya dapat digunakan untuk memproduksi garam. Garam gunung ini dalam bahasa lokal biasa disebut **Tucu'**.

Daerah dataran tinggi Krayan diyakini dulunya diyakini adalah **hamparan lautan**. Lalu dari proses geologi panjang terbentuklah dataran tinggi yang menyisakan banyak mata air asin.

Diyakini banyak **mengandung yodium** karena tidak ditemukan masyarakat mengidap penyakit kekurangan yodium (gondok). Mampu mempertahankan karakteristik warna sayur walau disimpan cukup lama. Disebut **berkhasiat menyembuhkan batuk-batuk** jika dikonsumsi.

Butiran Garam Gunung Krayan telah diidentifikasi dan diperoleh **kandungan mineral** antara lain: **Na, K, Mg, Al, Cu, Zn, Fe, Ba, dan Sr**. **Dari hasil Difraksi Sinar X (XRD)** terlihat bahwa puncak utama dari garam krayan tersebut menunjukkan puncak utama untuk **Kristal NaCl**, dengan impurities antara lain **KCl, CaCl2, MgCl2, dan AlCl3** berdasarkan hasil Spektrometer Serapan Atom (SSA).

Dalam sehari, **produksi Garam Krayan mampu mencapai 20 kg**. Pengelolaannya dilakukan secara individu melalui kelompok. Saat ini, masyarakat **meng-upgrade kemasan Garam Krayan** menjadi lebih menarik dan berisi informasi penting seperti **kadar gizi**.

Sumber: Berbagai sumber/diolah Biro Adpim.

BIRO ADPIM KALTARA

Panggung Dunia untuk Desainer Lokal



Ketua PKK Kaltara Hj. Rachmawati Zainal bersama desainer muda Kaltara tampil pada ajang fashion show, Lombok Internasional Modest Fashion Festival (Limoff) 2023 di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Utara, Hj. Rachmawati Zainal membawa delapan desainer muda asal Kalimantan Utara tampil pada ajang fashion show, *Lombok Internasional Modest Fashion Festival (Limoff) 2023* di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Alhamdulillah ini pertama kali kita (Kalimantan Utara) ikut pada *fashion show*, dengan desainer tingkat nasional hingga internasional dari lima negara asia," ujar Rachmawati Zainal.

Lombok Internasional Modest Fashion Festival (Limoff) 2023 digelar pada 6 hingga 9 Juli. Semangat dan antusiasme para desainer lokal Kalimantan Utara untuk tampil menunjukkan karyanya, disambut baik oleh istri orang nomor satu di Kalimantan Utara tersebut. Ia menjangir serta mendukung para desainer pilihan dari seluruh kabupaten/kota untuk langsung hadir dan tampil pada ajang nasional maupun internasional.

"Berani tampil ke depan agar bisa meraih prestasi, dan Kalimantan Utara sungguh hebat, mereka takjub melihat hasil karya anak-anak milenial kita yang masih muda-muda, perdana (tampil) langsung mengguncang Lombok," tuturnya.

Ratusan pasang mata menyaksikan hasil karya para desainer, dengan lenggak lengkok para model di atas catwalk. Rachmawati percaya di momen perdana ini pasti ada momen selanjutnya, untuk membuka peluang hasil karya

putra putri daerah untuk tampil lebih sempurna.

"Momen selanjutnya pasti akan lebih hebat lagi dan paling utama mereka mengangkat etnik lokal. Sangat terharu dan sangat bangga, takjub karena desain-desain yang tampil begitu luar biasa," ujarnya memuji para desainer.

Rachmawati juga menyampaikan Dekranasda Kalimantan Utara akan tampil pada *event-event* berikutnya. Untuk itu dirinya mengingatkan agar para desainer baik yang telah ikut maupun belum untuk mempersiapkan karya terbaiknya agar Kalimantan Utara bisa kembali tampil.

"Dan tidak menutup kemungkinan suatu saat kita go Internasional dengan tampil di Singapura, Thailand dan Filipina," tutup Rachma.

Nur Rizqiana salah satu desainer asal Kota Tarakan mengucapkan terima kasih kepada Ketua Dekranasda Kalimantan Utara yang telah mengikutsertakan para desainer untuk tampil.

"Tentunya untuk mengasah bakat kami, dan meningkatkan kreativitas, serta meningkatkan inovasi, di bidang fashion," ucapnya.

Selain Nur Rizqiana para desainer yang tampil adalah Solagratiya, Lucky Ahmad Sobirin berasal dari Kabupaten Bulungan, Faridatul Mawadah, Yolanda Meirisca, Enggar Wulaningtyas, Nirmala Ramadana, dari Kota Tarakan dan desainer asal Kabupaten Malinau, Mutia Ismik Rakhma.

Dekranasda Kalimantan Utara berfokus agar

ragam produk asli Kalimantan Utara dapat terus dikenal melalui berbagai cara nyata baik pameran kriya maupun *fashion show*.

Heri Siampa, selaku Sekretaris Dekranasda Kalimantan Utara mengungkapkan proses terpilihnya para desainer telah melalui penilaian yang objektif dan profesional.

"Kita seleksi para desainer dari lima kabupaten kota dengan sketsa desain busana muslim karena event kali ini berfokus pada busana muslim dengan tema formal, casual dan pesta untuk ikut pada ajang Limoff 2023 yang juga dihadiri para desainer mancanegara," ujar Heri Siampa.

Heri mengungkapkan sebagian desainer adalah binaan inkubasi Bank Indonesia bersinergi dengan Pemprov Kalimantan Utara melalui Dekranasda dan ke depan masih ada *event-event* lain yang membuka peluang bagi para desainer milenial lokal Kalimantan Utara untuk tampil di ajang nasional maupun internasional.

"Untuk itu kita terus mendorong agar para desainer lokal benuanta terus berinovasi dan memperkaya desainnya dengan tetap mempertahankan aspek kearifan lokal namun tetap menyatu dengan *trend* dan *fashion* modern saat ini," tutup Heri.

Adapun lima negara asing lain yang turut menampilkan karyanya pada Limoff 2023 adalah Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Kamboja. **BIRO ADPIM**

Tampil Classy dengan *Outfit* Batik Kaltara



Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.M.Hum dan Ketua TP PKK Hj. Rachmawati Zainal mengenakan outfit batik khas Kaltara pada fashion show bertajuk "Istana Berbatik" di Istana Negara, 1 Oktober 2023.

Peragaan busana atau *fashion show* bertajuk "Istana Berbatik" menjadi panggung bagi 506 peraga. Dua orang diantaranya ialah Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.M.Hum dan istri sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Utara Hj. Rachmawati Zainal Paliwang.

"Istana Berbatik" juga diikuti para Menteri dan Wakil Menteri beserta pasangan, gubernur dari seluruh provinsi, Duta Besar negara sahabat, perwakilan BUMN, perwakilan Kraton Yogyakarta, Solo dan Cirebon, model profesional, serta public figure.

Drs. H. Zainal A Paliwang dan Hj. Rachmawati Zainal santai dan menikmati penampilannya di atas catwalk. *Outfit* keduanya cukup menyita perhatian karena keindahan corak batik khas Kalimantan Utara yang mereka kenakan.

Gubernur Zainal memadupadankan atasan bercorak Dayak didominasi warna jingga dan hijau kebiruan, dengan bawahan hitam. Gubernur juga memadupadankan *outfit*-nya malam itu dengan Singal (sejenis aksesoris kepala) sebagai pelengkap. Motif Burung Enggang menambah elegan di malam "Istana Berbatik" itu.

Sedang Rachmawati Zainal Paliwang Ketua Tim Penggerak PKK, memadupadankan atasan blouse dengan Obi dengan kesan manis di sisi pinggang.

Menambah kesan stylish namun tetap melokal, keduanya juga mengeksplorasi kalung dan tas

anyaman rotan.

Sesekali keduanya melambaikan tangan kepada penonton yang hadir. Penghormatan kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin ditunjukkan keduanya.

Untuk diketahui, dalam rangka menyemarakkan Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober, peragaan busana bertajuk "Istana Berbatik" digelar untuk memamerkan dan mempromosikan keindahan batik Nusantara.

"Istana Berbatik" diselenggarakan di depan Istana Merdeka Jakarta, pada 1 Oktober 2023. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian BUMN, didukung oleh Pemprov DKI Jakarta, BUMN, BUMD DKI Jakarta, pihak swasta serta komunitas.

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana, serta Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wury Estu Handayani turut hadir dalam acara yang diselenggarakan untuk terus melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia.

Perhelatan ini diharapkan mendukung desainer lokal sekaligus mempromosikan kekayaan budaya Indonesia untuk memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Batik adalah seni tradisional Indonesia yang melibatkan pembuatan pola-pola rumit pada kain dengan menggunakan lilin dan pewarna. Teknik menggambar di atas kain ini merupakan warisan



budaya Indonesia yang telah dipraktikkan selama berabad-abad.

Oleh karena itu, "Istana Berbatik" hadir sebagai ajang untuk mengapresiasi para insan yang telah melestarikan budaya batik tersebut, serta menjadi perayaan bagi indahnya budaya batik Indonesia.

"Bangsa Indonesia patut bersyukur memiliki Batik yang bukan hanya sebagai karya seni biasa. Tapi merupakan warisan budaya tak benda dunia," kata Presiden. **BIRO ADPIM**

Insyallah Akhir 2024



Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum mengecek kondisi ruas jalan Malinau-Krayan yang tengah proses konstruksi pada ekspedisi "Memelah Belantara, Menembus Batas" pada pertengahan Agustus 2023.

Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum melintas dan merasakan langsung medan jalan perbatasan Malinau-Krayan yang tengah tahap konstruksi, dan meminta jalan itu terhubung serta berfungsi normal pada 2024.

"Supaya suplai sembako dan BBM (bahan bakar minyak) ke Krayan bisa melalui jalur darat," kata Zainal A Paliwang di Malinau.

Gubernur Kalimantan Utara beserta sejumlah staf pegawai Pemrov Kalimantan Utara melakukan ekspedisi perjalanan darat dari Kabupaten Malinau menuju Kecamatan Krayan di Kabupaten Nunukan, bertajuk "Menembus Belantara Menembus Batas" Senin, 14 Agustus 2023.

Ekspedisi itu menempuh jarak 182 kilometer dengan kondisi jalan yang masih proses konstruksi yang pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kondisi ruas jalan yang tengah proses konstruksi itu cukup ekstrim sebab melewati hutan belantara serta perbukitan yang curam.

Sejauh ini, Kecamatan Krayan dan sekitarnya hanya bisa diakses melalui pesawat udara berukuran kecil dengan sistem penerbangan perintis. Untuk bisa keluar masuk Krayan, masyarakat harus antre tiket penerbangan kurang lebih dua minggu. Krayan merupakan salah satu daerah di Kalimantan Utara yang sangat berdekatan dengan negara tetangga, Malaysia.

Gubernur Zainal menjelaskan, tidak perlu menunggu ruas jalan ini teraspal untuk bisa difungsikan. Yang terpenting ruas jalan dapat dengan aman dilalui semua jenis kendaraan, utamanya truk pengangkut sembako dan BBM.

"Walaupun ada jembatan yang belum permanen, bisa dibuat pakai kayu, yang penting tembus ke Krayan," ujarnya.

Dikatakan Gubernur Kalimantan Utara, ruas jalan dari Malinau sampai ke kilometer 43 sudah cukup baik karena sudah dapat dilalui kendaraan roda empat, meski belum diaspal.

Kepala Satuan Kerja Jalan Perbatasan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara, Budiman mengupayakan agar jalan ke Krayan dapat fungsional tahun depan. "Insyallah akhir 2024," kata Budiman.

Dia memaparkan, kendala jalur ke Krayan terletak di Semamu. Belum ada jembatan yang dapat dilalui mobil. Sehingga dari Malinau mobil sementara hanya bisa sampai ke Semamu. Akhir tahun ini diharapkan bisa dibangun jembatan.

Titik kendala selanjutnya adalah Binuang, Kabupaten Nunukan. Di Binuang, mobil juga belum bisa melintas karena jalan yang berair. Kalau air pasang, mobil tidak bisa lewat, sehingga ke Krayan sementara ini hanya bisa dilalui dengan motor.

Sebelumnya, Kementerian PUPR menyatakan pembangunan ruas jalan Malinau-Krayan Krayan-

Malinau didukung anggaran APBN sebesar Rp800 miliar dengan Malinau-Krayan harus tembus.

Untuk diketahui, proyek jalan sepanjang 203 kilometer untuk membuka keterisolasian Kecamatan Krayan yang berbatasan dengan Malaysia masih berlangsung. Sementara ini, akses utama ke Krayan hanya melalui penerbangan pesawat perintis dengan jadwal penerbangan yang masih terbatas.

Walaupun jalur darat seperti yang tengah dilalui rombongan tim ini memungkinkan, tetapi medannya berat dengan beberapa tanjakan yang elevasinya menantang, turunannya curam, dengan permukaan berlumpur yang menyulitkan roda dan kemudi. Pemandangan pekerja proyek dan alat berat di sepanjang ruas ini cukup sering terlihat. **BIRO ADPIM**

PEMBANGUNAN RUAS JALAN PERBATASAN MALINAU-KRAYAN

- Pembangunan jalan ini bagian program pembukaan isolasi wilayah melalui pemenuhan infrastruktur jalan dan jembatan. Jalan ini merupakan usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara, dan merupakan bagian dari ruas jalan yang dibuka untuk menghubungkan Malinau-Krayan.
- Kementerian PUPR menargetkan pengerjaan pembangunan jalan perbatasan sepanjang 997 km di Kalimantan Utara. Dari total tersebut, pengerjaan dibagi ke dalam dua target, yakni jalan paralel perbatasan sepanjang 640 km dan jalan akses perbatasan sepanjang 357 km.
- Pemetaan jalan paralel perbatasan seluruhnya berada di Kabupaten Malinau yang meliputi ruas jalan Long Boh-Long Nawang-Data Dian. Sedangkan jalan akses perbatasan, pengerjaannya meliputi akses jalan Malinau-Long Bawan-Long Midang sepanjang 202 km dan akses jalan Mansalong-Tau Lumbis (Nunukan) sepanjang 155 km.
- Jalan akses perbatasan Malinau-Krayan sepanjang 196,34 Km yang terbagi dari ruas Malinau-Long Semamu 94,11 Km, Long Semamu-Long Nawan 91,53 Km, dan Long Bawan-Long Midang 10,7 Km dan ditarget selesai pada 2024.
- Selain jalan, ruas Malinau-Krayan terdapat sekitar 37 titik jembatan yang harus dibangun, mulai dari Long Semamu hingga Long Bawan. Sejumlah jembatan ini memiliki bentangan yang bervariasi, mulai dari yang pendek hingga yang panjang. Pembangunan ruas Malinau-Krayan dibiayai APBN senilai Rp800 miliar.
- Pembangunan jalan ini terus disebut untuk membuka keterisolasian wilayah, menekan kesenjangan wilayah, serta meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah-daerah perbatasan di Kalimantan Utara.
- Pembangunan jalan perbatasan diprioritaskan untuk memudahkan akses warga Krayan dan daerah perbatasan lainnya menuju Malinau dan daerah lainnya seperti Tanjung Selor sehingga tidak perlu lagi menggunakan pesawat untuk menjangkau daerah-daerah tersebut, begitu juga sebaliknya.

Sumber: Berbagai sumber & diolah Biro Adpim

BIRO ADPIM KALTARA

Mengembalikan Fungsi Sungai Selor



Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.M.Hum berdiri di badan eskavator yang sedang dioperasikan pada proyek normalisasi Sungai Selor.

Proyek revitalisasi Sungai Selor dengan pekerjaan pengerukan dan pembersihan tanaman, kurang lebih sepanjang enam kilometer. Pengerukan dan pembersihan sungai dari tanaman liar untuk mengembalikan fungsinya ke semula sebagai jalur transportasi masyarakat dan sumber air baku perusahaan air minum milik Pemerintah Daerah.

Proyek normalisasi sungai pada 2023 ini akan menghabiskan dana Rp5 miliar. Pekerjaan tahap pertama akan tuntas pada akhir tahun ini. Kemudian akan dilanjutkan tahap dua pada 2024 mendatang.

"*Inshaallah* akhir 2024 proyek normalisasi Sungai Selor tuntas 100 persen dan kita harapkan kembali ke fungsi semula serta bermanfaat untuk masyarakat," ujar dia.

Pemprov Kalimantan Utara juga berminat mengembangkan sektor pariwisata dan UMKM dengan memanfaatkan keberadaan sungai ini. Jika anggaran memungkinkan, sungai ini akan dipasang turap pada tiap sisi tepinya dalam rangka mencegah abrasi sekaligus membangun pedestrian di sepanjang tepinya.

"Jadi bisa bermanfaat juga untuk pengembangan pariwisata dan UMKM ke depan, jika anggaran mencukupi untuk membangun fasilitas itu," ujarnya.

Proyek normalisasi Sungai Selor dikerjakan Pemprov Kalimantan Utara bersama Korem 092/ Maharajalila. Pemprov Kalimantan Utara

mengerjakan mulai dari sisi selatan, sedangkan Korem 092 mengerjakan pengerukan dan pembersihan tanaman dimulai dari arah barat.

Pengerjaan proyek ini menggunakan excavator buatan dalam negeri yaitu *Excavator Amphibi Long Arm Pindad*. Gubernur Zainal mengatakan excavator itu baru sebulan dibeli dari PT. Pindad. Pertimbangannya pembelian ini karena adanya nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

TKDN adalah nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri, termasuk biaya pengangkutan yang ditawarkan dalam item penawaran harga barang maupun jasa. TKDN merupakan menjadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan.

"Alat yang kita gunakan ini kondisi baru dan produksi dalam negeri sesuai perintah Pak Presiden bahwa beli dan bangga buatan Indonesia," demikian Gubernur Kalimantan Utara. Sekda Kaltara minta perangkat daerah penuh 30 persen nilai TKDN.

30 Persen Komponen Dalam Negeri

Gubernur Kalimantan Utara meminta organisasi perangkat daerah (OPD) memenuhi minimal 30 persen nilai penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada pengadaan barang dan jasa. Kepala OPD dan Sekretarisnya bertanggung jawab mengawasi dan melaporkan penerapan TKDN pada instansinya masing-masing.

Ruang lingkup pengawasan mencakup pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya; kepatuhan terhadap peraturan; pencapaian TKDN; penggunaan produk dalam negeri; pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan pengadaan berkelanjutan.

Gubernur mengatakan Pemerintah mendorong pengoptimalan kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Salah satunya dengan membuat peraturan yang memuat kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 adalah salah satu peraturan yang mengatur hal tersebut. Lebih tepatnya tertuang pada Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 61.

Pasal 57 a berbunyi, "Produk Dalam Negeri wajib digunakan oleh pengguna Produk Dalam Negeri sebagai berikut: Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri".

Pasal 58 berbunyi "Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa".

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, peraturan lain yang mengatur penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Lebih tepatnya pada Pasal 66 dan Pasal 76.

Pasal 66 berbunyi, "Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional". Pasal 76 berbunyi "Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing". **BIRO ADPIM**

Menyiapkan Transmisi PLTA Mentarang-KIHI Tanah Kuning



Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.M.Hum menandatangani MoU dengan PT. Kayan Hydro Nusantara (KHN), investor proyek PLTA Mentarang Induk, Kabupaten Malinau.

Seiring peletakan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk berkapasitas 1.357 Mega Watt (MW) oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 1 Maret 2023 di Kabupaten Malinau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta perusahaan pelaksana Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk kini menyiapkan pembangunan dan pengoperasian jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 Kilo Volt (KV).

Jaringan SUTET tersebut akan didirikan dari PLTA Mentarang Induk sampai Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan.

Sistem jaringan transmisi listrik ini merupakan bagian dari PLTA Mentarang Induk sebagai pengembangan energi hijau di Indonesia. Proyek ini akan dibangun sepanjang kurang lebih 230 kilometer melintasi tiga kabupaten di Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Bulungan.

"Jaringan ini dibangun oleh investor dalam

rangka menyuplai energi terbarukan ke PSN Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang sedang dikembangkan di Tanah Kuning, Bulungan," kata Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum.

Gubernur mengatakan masyarakat dan Pemerintah Daerah patut bersyukur karena pembangunan PLTA Mentarang Induk ikut didukung oleh Presiden Joko Widodo. Presiden juga mendorong Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunannya.

Direktur PT. Kayan Hydropower Nusantara (KHN) yang menggarap proyek PLTA Mentarang Induk, Nur Pamudji mengatakan pembangunan PLTA Mentarang Induk sampai saat ini berjalan baik.

Sedangkan proyek sistem jaringan transmisi listriknya, dimulai disiapkan sejak 2020 dan saat ini tahap persiapan teknis yang komprehensif agar dapat dimulai pada 2026 dan selesai pada 2029 bersamaan dengan pengoperasian PLTA.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan menara SUTET 500 KV dan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) membutuhkan



persetujuan lingkungan dan AMDAL dari Kementerian LHK dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha.

"Penyusunan Amdal tersebut kami melibatkan masyarakat sekitar jalur transmisi yang diusulkan untuk mendapatkan saran tanggapan dan pendapat bagi perumusan pengelolaan dampak lingkungan atas pembangunan proyek," tutur dia. **BIRO ADPIM**

Memacu Daya Serap



Gubernur Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum memberi arahan kepada jajaran ASN Pemprov Kaltara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.997.361.701.915,00, dibagi menjadi empat jenis belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

APBD tersebut tersebar ke 66 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Agustus 2023 berdasarkan tarikan dari aplikasi *E-Bang* yang telah disesuaikan dengan aplikasi *Financial Management Information System* atau *FMIS* adalah sebesar Rp1.497.571.084.758,00 atau sebesar 49,96 persen, dengan rincian realisasi belanja operasi sebesar Rp1.014.201.947.930,00 (54,98 persen), belanja modal sebesar Rp229.736.739.735,00 (33,20 persen), belanja tidak terduga sebesar Rp6.687.355.539,00 (66,87 persen), dan belanja transfer sebesar Rp246.945.041.554,00 (54,74 persen).

Adapun realisasi fisik pada Agustus 2023 telah mencapai 50,49 persen, dengan rincian realisasi fisik belanja operasi sebesar 53,54 persen, belanja modal sebesar 39,73 persen, belanja tidak terduga sebesar 67 persen, dan belanja transfer sebesar 60,12 persen.

Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum menyebut terdapat 10 OPD yang memiliki realisasi fisik tertinggi dan realisasi fisik terendah, begitu juga dengan perolehan realisasi keuangan, terdapat 10 OPD yang memiliki realisasi keuangan tertinggi dan juga terendah.

Gubernur terus memerintahkan jajarannya untuk selalu berkonsentrasi mempercepat realisasi APBD. Sebab, APBD sebagai salah satu bentuk investasi Pemerintah Daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara yang pada gilirannya adalah mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata.

Selain meminta agar serapan APBD didorong, Gubernur tetap mengingatkan jajarannya agar tetap mewaspadai berbagai hal yang dapat mengganggu realisasi APBD, seperti gejolak ekonomi, inflasi, bencana alam, *El Nino*, hingga politik.

Selain itu, ia meminta perlunya memaksimalkan dan memprioritaskan belanja APBD 2023 dengan mengutamakan produk-produk lokal Kalimantan Utara dan dalam negeri.

Capai Target, Utamakan Kualitas

Pembangunan infrastruktur memberikan peranan sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan infrastruktur juga berperan untuk memudahkan Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi pelayanan publik, pembangunan lainnya, serta jalannya roda pemerintahan.

Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum meminta seluruh pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBD 2023 diselesaikan sesuai target dengan tetap mengutamakan kualitasnya.

Salah satu yang diatensi Gubernur adalah penyelesaian pembangunan gedung Sekretariat Provinsi di Jalan Kolonel Soetadji, Tanjung Selor. Gedung ini ditargetkan selesai pada 2024. Namun beberapa bagian lain gedung tersebut ditarget dapat difungsikan pada Oktober ini yakni ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Provinsi.

Progres pembangunan gedung ini telah mencapai 70 persen. Lantai tiga dan empat ditarget rampung dalam waktu dekat.

Proyek pembangunan Cipta Karya lainnya adalah rumah jabatan Gubernur. Progresnya telah ditinjau oleh Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si pada September kemarin. Rumah jabatan itu akan selesai pada akhir 2023.

Wakil Gubernur menyampaikan apresiasinya terhadap kemajuan signifikan yang telah dicapai dalam pembangunan rumah jabatan ini.

"Rumah jabatan Gubernur Kaltara dirancang sebagai pusat penting yang akan memungkinkan Gubernur untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan optimal," tutur Wakil Gubernur.

Untuk diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara sejauh ini belum memiliki rumah jabatan tetap yang menjadi aset Pemprov. Rumah jabatan yang dihuni Gubernur di Jalan enggang, Tanjung Selor adalah aset Pemerintah Kabupaten Bulungan yang sedianya adalah rumah jabatan Bupati Bulungan.

Proyek lainnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat adalah normalisasi Sungai Selor di Tanjung Selor. Proyek yang dikerjakan bersama Korem 092/Maharajalila ini telah mencapai progres 59,94 persen.

Proyek ini diharapkan mengembalikan fungsi Sungai Selor sebagai jalur transportasi masyarakat sekaligus sumber mata pencaharian masyarakat, sekaligus menjadi sumber air baku bagi perusahaan air minum milik Pemerintah Daerah setempat.

Infrastruktur sektor pendidikan, khususnya bangunan gedung, juga cukup banyak dibangun. Seperti laboratorium bahasa, kimia, biologi, dan lainnya. Termasuk ruang guru maupun ruang kelas baru. Pembangunan sarana pendidikan itu tersebar di lima kabupaten/kota.

Sebagai urat nadi perekonomian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga membangun ruas jalan seperti jalan usaha tani, semenisasi, jalan lingkungan, jembatan semi permanen.

Jalan juga dibangun merespons sejumlah masyarakat. Salah satunya adalah jalan lingkaran Krayan. Pada APBD-Perubahan 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah mengalokasikan anggaran Rp15 miliar untuk penanganan ruas jalan tersebut.

Infrastruktur jalan merupakan arus penghubung antara masyarakat dengan kegiatan ekonomi, sehingga akan tercapai kegiatan ekonomi masyarakat apabila tersedianya infrastruktur jalan yang baik dan memadai. **BIRO ADPIM**

GARIS BESAR PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR APBD KALIMANTAN UTARA 2023

Gedung Perkantoran

- Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara Tahap IX Rp90,2 miliar
- Pembangunan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Multiyears) Rp228,7 miliar
- Pembangunan Rumah Jabatan Gubernur Rp34,7 miliar
- Pembangunan Istana Kesultanan Djalaluddin Tanjung Palas - Bulungan Rp5,5 miliar
- Belanja Modal Pembangunan Persemaian Permanen Tanjung Palas - Bulungan Rp2 miliar
- Pembangunan Kantor Resort KPH Tanjung Palas - Bulungan Rp1,4 miliar
- Pembangunan Sel Tambahan Polres Nunukan Rp877,8 miliar
- Pembangunan Menara Pengawas Kebakaran dan Fasilitas Pendukung Tana Kuning - Bulungan Rp999,9 juta
- Pembangunan Menara Pengawas Kebakaran dan Fasilitas Pendukung Mangkupadi - Bulungan Rp1 miliar
- Rehabilitasi mess Kejaksaan Nunukan Rp499,9 juta
- Pembangunan gedung olahraga Desa Tengkapak - Bulungan Rp849,2 juta
- Renovasi kantor Kejaksaan Negeri Bulungan Rp500 juta
- Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kaltara Tahap I - Bulungan Rp16 miliar
- Belanja Modal Pembangunan Kantor Resort KPH Mangkupadi - Bulungan Rp1,5 miliar
- Pembangunan jaringan dan aksesoris air bersih Kantor Camat Krayan Tengah Rp508,1 juta
- Rehabilitasi dermaga Tengkeyu II Kota Tarakan Rp2,7 miliar
- Pembangunan Gedung Laboratorium Lingkungan Hidup Tahap III - Bulungan Rp4,3 miliar
- Pembangunan Pasar Distribusi Tulin Onsoi - Nunukan Rp3 miliar
- Pembangunan Penyediaan Air Baku Desa Antutan - Bulungan Rp450 juta
- Pembangunan Tanggul Pengendali Banjir Tanjung Buka SP. 9 - Bulungan Rp1,1 miliar
- Pembangunan Rumah Garam Krayan - Nunukan Rp2,7 miliar
- Pembangunan Pos Check Point Lalu Lintas Ternak Perbatasan Kaltim-Kaltara Rp627,8 juta



Sumber: Ekspres & Litbang Kalimantan Utara, dan Biro Adpim

GARIS BESAR PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR APBD KALIMANTAN UTARA 2023

Pendidikan

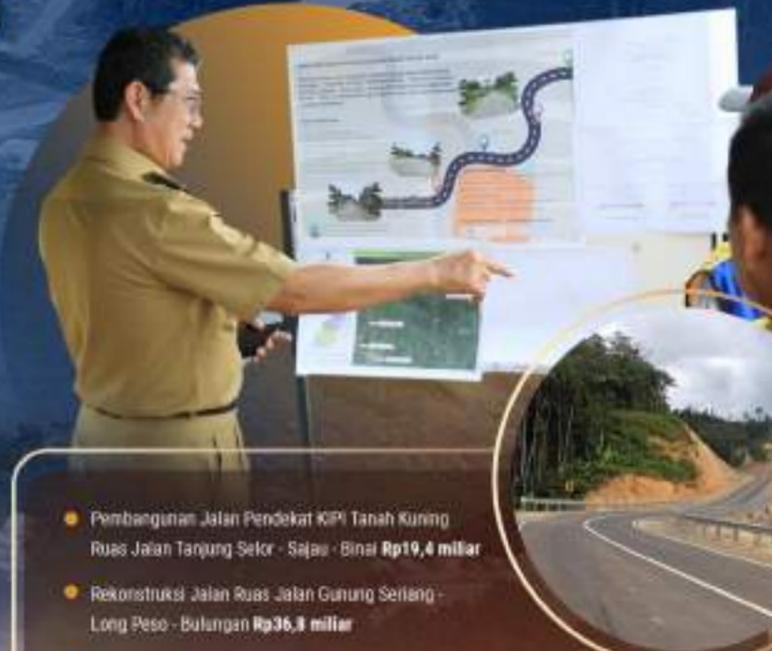
- Pembangunan Mushola SMAN 1 Tanjung Palas - Bulungan Rp845,5 juta
- Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMA IT Ibnu Sina - Nunukan Rp 1,7 miliar
- Pembangunan ruang laboratorium biologi SMKN 1 Tana Tidung Rp622 juta
- Semeniasi jalan lingkungan SMK 1 Seimenggaris - Nunukan Rp1,2 miliar
- Pembangunan ruang OSIS SMAN 3 Malinau Rp446,5 juta
- Pembangunan ruang laboratorium bahasa SMKN 1 Malinau Rp676 juta
- Pembangunan ruang laboratorium kimia SMAN 3 Malinau Rp777,5 juta
- Pembangunan ruang laboratorium bahasa SMKN 1 Bunyu - Bulungan Rp622 juta
- Pembangunan ruang BK SMKN 1 Bunyu - Bulungan Rp403 juta
- Pembangunan ruang laboratorium kimia SMKN 1 Tana Tidung Rp622 juta
- Pembangunan ruang laboratorium biologi SMAN 1 Tanjung Palas Timur - Bulungan Rp912,5 juta
- Pembangunan ruang UKS SMAN 1 Tanjung Palas Timur - Bulungan Rp482,5 juta
- Pembangunan ruang Ruang Bimbingan Konseling (BK) SMKN 1 Tanjung Palas Timur - Bulungan Rp434 juta
- Pembangunan ruang laboratorium fisika SMAN 1 Tanjung Palas Timur Rp912,5 miliar
- Pembangunan ruang kelas baru SMA Bulungan - Tanjung Selor Rp3,2 miliar
- Pembangunan ruang keterampilan SLB Negeri Nunukan Rp314 juta
- Pembangunan ruang keterampilan SLB Negeri Nunukan Rp314 juta
- Pembangunan ruang laboratorium fisika SMKN 1 Malinau Rp622 juta
- Pembangunan ruang Ruang Bimbingan Konseling (BK) SMKN 1 Malinau Rp403 juta
- Pembangunan ruang laboratorium komputer SMA Bulungan Rp487 juta
- Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMAN 1 Sebuku - Nunukan Rp500,8 juta
- Pembangunan ruang laboratorium kimia SMKN 3 Tarakan Rp622 juta
- Pembangunan ruang laboratorium fisika SMKN 3 Tarakan Rp622 juta
- Pembangunan ruang laboratorium fisika SMKS Nurul Iman Sebatik Timur Rp622 juta
- Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SLB NEGERI Nunukan Rp1,2 miliar
- Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 12 Malinau Rp2,6 miliar
- Pembangunan ruang guru SMAN 12 Malinau Rp1,3 miliar
- Pembangunan ruang laboratorium komputer SMAN 12 Malinau Rp608,5 juta
- Pembangunan ruang laboratorium fisika, asrama siswa, rumah dinas guru SMAN 1 Peso - Bulungan Rp2,2 miliar
- Pembangunan Unit Sekolah Baru, laboratorium fisika, perpustakaan, Ruang Praktik Siswa, Kepsek, Tata Usaha, Guru, Toilet SMKN 1 Lumbis Ogong - Nunukan Rp11,3 miliar



GARIS BESAR PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR APBD KALIMANTAN UTARA 2023

Jalan

- Pemanganan Longsoran Ruas Jalan Gunung Selatan - Kota Tarakan Rp6,5 miliar
- Pengadaan Pekerjaan Fisik Jalan Usaha Tani Long Temuyat - Malinau Rp800 juta
- Pengadaan Pekerjaan Fisik Jalan Usaha Tani Sembakung Alalay - Nunukan Rp799 juta
- Semeniasi Jalan Rumah Sakit Long Layu Desa Lembudung, Krayan Selatan - Nunukan Rp375 juta
- Pembangunan Jembatan Semi Permanen Pinan Setarap - Malinau Rp6 miliar
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan P. Aji Iskandar RT. 8 Kelurahan Juata Keriki - Kota Tarakan Rp500 juta
- Semeniasi dan Drainase Jalan Krayan RT.14 Jelazai - Bulungan Rp280 juta
- Peningkatan Jalan lingkungan kantor Camat Krayan Tengah - Nunukan Rp901,6 juta
- Peningkatan Jalan Menuju Desa Liak-Buku, Binanun, Pulau Keras - Nunukan Rp1,5 miliar
- Pemeliharaan Jalan Simpang Kuburan Menuju Berian Baru Krayan - Nunukan Rp1,8 miliar
- Pembangunan jalan utama Desa Tinampak II, Desa Bafatkon, Desa Tau Bau Kecamatan Tulin Onsoi - Nunukan Rp545,2 juta
- Pembangunan Jalan Inspeksi D.I.II Bengalon - Malinau Rp350 juta
- Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan Area Perke Pelabuhan Lem He Dyang Nunukan Rp783,7 juta
- Pembangunan Jalan Pendekat KIP Tanah Kuning Ruas Jalan Tanjung Selor - Sajau - Binai Rp19,4 miliar
- Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Gunung Seriang - Long Pesu - Bulungan Rp36,8 miliar
- Pembangunan Jalan Pendukung Pelabuhan Baru Tanjung Selor Ruas Jalan Selimau III - Pesawan - Manjuaring - Bulungan Rp17,3 miliar
- Peningkatan Jalan Bukit Indah-Perum Korpi Tanjung Selor Rp3,5 miliar
- Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Karaag Agung - Kubir - Selimbau Rp21,8 miliar
- Pembangunan Jalan Kompleks Gedung SPN Polda Kalimantan Utara Rp13,4 miliar
- Pembangunan Asrama DIMAL Provinsi Kalimantan Utara - Bulungan Rp 17,0 miliar
- Pembangunan Asrama DIMAL Provinsi Kalimantan Utara - Bulungan Rp 17,0 miliar
- Pemanganan Long Segment Kondisi Jalan Ruas Ring Road Malinau Rp16,9 miliar
- Pemanganan Long Segment Kondisi Jalan Ruas Lingkar Palee-Nunukan Rp25,6 miliar
- Pemanganan Long Segment Kondisi Jalan Ruas Tanah Kuning - Mangkupadi Rp20,4 miliar



Kontribusi Sektor Konstruksi



Potret salah satu areal pembangunan KIH Tanah Kuning yang dikembangkan oleh salah satu investor.

Kinerja sektor konstruksi di Kalimantan Utara pada triwulan dua 2023 tumbuh 6,29 persen sejalan dengan berlanjutnya sejumlah proyek strategis di provinsi ini.

Pertumbuhan itu lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (triwulan dua 2022) yaitu sebesar 2,59 persen, berdasarkan catatan Laporan Perekonomian Kalimantan Utara Agustus 2023 yang disampaikan Bank Indonesia.

Lapangan usaha konstruksi menyusun atau memberi andil 10,77 persen pangsa perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan satu 2023 dengan andil terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB sebesar 0,71 persen.

Kemudian, peningkatan kinerja konstruksi pada triwulan dua 2023 yang mengalami peningkatan cukup signifikan, disebabkan berlanjutnya pembangunan sejumlah proyek strategis baik level nasional maupun daerah di Kalimantan Utara.

Pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIH) di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan kembali diakselerasi pada triwulan dua 2023. Pembangunan infrastruktur dasar seperti pelabuhan jetty, gedung pengelola kawasan, dan dormitory, sebagian telah selesai dibangun dan mulai beroperasi.

Pembangunan proyek strategis lainnya seperti jalan perbatasan Malinau-Krayan juga terus berlanjut dengan target beroperasi pada 2024 mendatang. Selain itu, pada 1 Maret 2023, Presiden Joko Widodo telah melakukan *groundbreaking* Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk di Kabupaten Malinau yang memiliki potensi kapasitas energi mencapai 1.375MW dan akan menjadi salah satu pemasok kebutuhan listrik di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain berjalannya proyek di atas, pembangunan pabrik kertas di Kota Tarakan terakseleratif sejak awal 2023 turut memberikan andil terhadap pertumbuhan kinerja lapangan usaha konstruksi.

Adapun lapangan Industri Pengolahan juga tercatat tumbuh positif pada triwulan dua 2023, meskipun melambat dibandingkan dengan triwulan satu 2023.

Industri Pengolahan tercatat tumbuh sebesar 2,24 persen (*yoy*) pada triwulan dua 2023, lebih rendah dibandingkan dengan capaian triwulan satu 2023 sebesar 3,81 persen (*yoy*).

Berdasarkan pangasanya, Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 7,68 persen dalam struktur perekonomian Kalimantan Utara dengan andil terhadap pertumbuhan sebesar 0,20 persen pada triwulan II 2023.

Melambatnya kinerja LU Industri Pengolahan terutama didorong oleh penurunan permintaan produk olahan kayu lapis pada triwulan II 2023. Hal ini sejalan dengan melambatnya produksi pada awal tahun di tengah kondisi cuaca yang kurang kondusif. Kondisi tersebut berdampak pada melambatnya volume ekspor *plywood*. **BIRO ADPIM**

Antisipasi Efek *El Nino*

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memprogramkan gerakan tanam padi seluas 500 hektare yang tersebar di lima kabupaten/kota, sebagai langkah antisipasi dampak *El Nino* terhadap sektor pangan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga meminta seluruh pihak ikut mengantisipasi fenomena *El Nino* dan menjadikan perhatian bersama untuk mencegah dampak yang signifikan terhadap sektor pangan.

Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si menyebut pemberian pemahaman yang baik tentang *El Nino* penting bagi petani agar dapat mengambil langkah pencegahan dan penyesuaian yang tepat.

Ia melanjutkan, program gerakan tanam padi seluas 500 hektare yang tersebar di lima kabupaten/kota, menggerakkan 34 kelompok tani yang telah menerima fasilitas pelatihan tata cara budidaya pangan dengan 18 titik Laboratorium Lapang.

Laboratorium Lapang adalah pusat pembelajaran, pengkajian, dan pengembangan program serta kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat, khususnya pada sektor pertanian.

Selain *El Nino*, sektor pangan juga dihadapkan pada pertumbuhan penduduk Kalimantan Utara yang diprediksi sudah mencapai 866.300 jiwa pada 2025 mendatang.

Kemudian, hadirnya proyek strategis nasional Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIH) di Bulungan dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk di Malinau membuka kesempatan kerja bagi pencari kerja, keluarga, dan kerabatnya.

Karena itu, Kalimantan Utara utara harus bersiap menghadapi tantangan pemenuhan pangan yang begitu tinggi. Kesiapan harus dimulai dari para petani, pengusaha sektor pertanian arti luas (pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan). Semuanya harus berjuang meningkatkan produksi dan diversifikasi produk pangan yang lahir dari petani-petani daerah, tanpa menunggu pasokan dari luar daerah.



Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si (depan) dan jajaran meninjau areal persawahan masyarakat di Kabupaten Malinau.

Selain peluang sektor pangan terkait hadirnya dua proyek strategis nasional itu, Wakil Gubernur juga menyebut peluang tinggi juga datang atas kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Pada akhir Agustus 2023, sejumlah kelompok tani diberikan bimbingan teknis Antisipasi Dampak *El Nino* dan Introduksi Komoditas Pertanian Unggulan 2023.

Bimbingan itu diharapkan menjawab beberapa tantangan *El Nino* dan pertumbuhan penduduk bagi sektor pangan.

Selain itu, menjadi wadah penyebarluasan informasi sekaligus introduksi teknologi dan komoditas pertanian unggulan seperti pemanfaatan mesin pakan ikan dan ternak dan pengenalan formulasi pakan ternak.

Selain itu menjadi wadah pengenalan peluang usaha pisang *cavendish*, sorgum, talas benang; pelatihan pembuatan bahan organik dalam rangka mengantisipasi lonjakan harga pupuk kimia serta penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. **BIRO ADPIM**

Terjangkau Berkat Subsidi



Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penumpang dan barang bagi masyarakat pedalaman dan perbatasan Kalimantan Utara, kembali dilanjutkan dengan biaya APBD Rp15,5 miliar.

Peluncuran program SOA ini dilakukan Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang, SH, M.Hum ditandai penerbangan perdana pesawat Caravan/C208 B-EX rute Tarakan-Long Ampung dan rute Tarakan-Long Bawan dari Bandar Udara Juwata, Kota Tarakan, 11 Juli 2023.

"Dengan subsidi ini, harga tiket menjadi lebih murah dan harga barang akan diterima masyarakat dan tetap terjangkau," kata Gubernur di Tarakan.

Rinci alokasinya, SOA penumpang sebesar Rp7,5 miliar dan SOA barang sebesar Rp8 miliar.

Rute jangkauan SOA penumpang, meliputi Tanjung Selor-Mahak Baru (PP), Tanjung Selor-Long Pujungan (PP), Tanjung Selor-Long Alango (PP), Tanjung Selor-Long Ampung (PP), Tarakan-Long Layu (PP), Tarakan-Long Bawan (PP), Tarakan-Long Ampung (PP), Nunukan-Long Layu (PP), Nunukan-Binuang (PP), Malinau-Long Bawan (PP), dan Malinau-Binuang (PP).

Adapun SOA barang meliputi pengangkutan bahan kebutuhan pokok ke wilayah Krayan, Lumbis, Sei-Menggaris, Pujungan, Bahau Hulu, Mentarang Hulu, Sungai Tubu, Long Ampung, dan Apau Kayan.

"Alhamdulillah, SOA penumpang maupun barang bagi masyarakat Kalimantan Utara khususnya yang tinggal di wilayah perbatasan dan pedalaman sudah bisa dinikmati," kata Gubernur.

Untuk diketahui, Pemprov Kalimantan Utara mensubsidi biaya angkutan barang kebutuhan pokok masyarakat yang dibeli dari kota untuk dijual di desa-desa pedalaman.



Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, SH, M.Hum bersama staf, pihak maskapai, dan masyarakat pada penerbangan perdana SOA Udara APBD Kalimantan Utara 2023 di bandara Juwata Kota Tarakan.

Sedangkan subsidi penumpang, mensubsidi biaya atau harga tiket penerbangan pesawat perintis ke daerah-daerah pedalaman dan perbatasan maupun sebaliknya.

SOA barang jadi instrumen atau alat pemerintah untuk tetap menjaga harga kebutuhan pokok di desa tetap terjangkau seperti harga komoditas di kota.

Demikian juga dengan SOA penumpang pesawat udara diberikan dengan harapan harga tiket lebih terjangkau masyarakat.

Sebelumnya pada 2022 Pemprov Kalimantan Utara menganggarkan subsidi angkutan barang sebesar Rp8,6 miliar bagi 14 titik pedalaman dan perbatasan di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.

Titik itu yakni Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Sungai Tubu, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Lumbis Hulu, Kecamatan Lumbis Pensiangan, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sei Menggaris, Kelurahan Sebakis, Daerah Krayan, Kecamatan Sungai Boh, dan Kecamatan Kayan Hilir.

Adapun subsidi angkutan penumpang 2022 lalu dialokasikan sebesar Rp5 miliar, meliputi penerbangan dari Tanjung Selor dan Tarakan tujuan daerah-daerah pedalaman dan perbatasan seperti Long Bawan, Long Ampung, Mahak Baru, Long Alango, Pujungan, Long Sule, dan Data Dian. **BIRO ADPIM**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Jadwal dan Tarif Penerbangan

Subsidi Ongkos Angkut (Penumpang) Provinsi Kalimantan Utara



Rute (Pesawat Caravan / c208)	Tarif	Jadwal	Waktu (LT)
Tanjung Selor ↔ Long Bawan	Rp. 433.000,-	Senin, Sabtu	14.00, 12.40
Tarakan ↔ Long Bawan	Rp. 464.000,- Rp. 419.000,-	Senin, Sabtu	11.30, 15.20
Long Apung ↔ Tanjung Selor	Rp. 402.000,-	Selasa	09.30, 11.00
Malinau ↔ Long Bawan	Rp. 370.000,-	Rabu, Sabtu	08.30, 09.15
Tarakan ↔ Long Apung	Rp. 480.000,- Rp. 435.000,-	Selasa	08.00, 12.30
Mahak Baru ↔ Tanjung Selor	Rp. 402.000,-	Senin	10.00, 11.15

Rute (Pesawat Pilatus / Pc6)	Tarif	Jadwal	Waktu (LT)
Pujungan ↔ Tanjung Selor	Rp. 380.000,-	Senin	09.30, 10.30
Malinau ↔ Binuang	Rp. 274.000,-	Rabu	08.00, 11.15
Tarakan ↔ Long Layu	Rp. 504.000,- Rp. 459.000,-	Kamis	09.00, 12.45
Binuang ↔ Nunukan	Rp. 459.000,-	Rabu	08.45, 10.00
Long Layu ↔ Nunukan	Rp. 459.000,-	Kamis	10.45, 11.30
Long Alango ↔ Tanjung Selor	Rp. 380.000,-	Selasa	09.15, 10.15

Pemesanan Tiket

- 0813 1045 0184 Tarakan
- 0812 5832 0897 Nunukan
- 0823 1280 4989 Malinau
- 08134878 1455 Tanjung Selor
- 0852 4665 2384 Mahak Baru
- 0822 4211 2927 Long Bawan
- 0821 5200 9666 Long Layu
- 0821 4925 0969 Long Alango
- 0823 9477 4746 Long Apung
- 0813 4764 6825 Binuang
- 0853 4870 3127 Pujungan

Sumber : smart cakrawala aviation





Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, SH, M.Hum (dua kiri) dan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si (dua kanan) rapat darurat di Malinau merespons bencana banjir besar di daerah Malinau dan Nunukan pada akhir September 2023.

Respons Cepat Banjir Malinau-Nunukan

Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang bersama Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si beserta jajaran bergerak cepat melakukan penanganan dampak banjir yang melanda Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan pada akhir pekan ketika September 2023, khususnya terhadap masyarakat yang terdampak banjir.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengalokasikan masing-masing Rp200 juta kepada Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Selain itu, memberikan bantuan beras sebanyak tiga ton.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara turut prihatin atas musibah banjir di Malinau dan Nunukan," kata Gubernur.

Baik Gubernur maupun Wakil Gubernur terjun langsung ke lokasi meninjau dampak banjir Malinau, termasuk turut memberikan dukungan moril terhadap masyarakat. Keduanya juga menyempatkan meninjau lokasi posko penampungan pengungsi di Stadion Utama Malinau, dapur umum yang didirikan Kodim 0910 Malinau. Selain itu, Gubernur juga mengunjungi lokasi dan warga terdampak banjir di Mensalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan.

Gubernur Drs. Zainal A Paliwang telah meminta jajarannya selalu bergerak cepat memastikan hadirnya pelayanan kesehatan dan ketersediaan logistik yang baik terhadap warga terdampak serta kebutuhan dasar bagi para pengungsi.

Sebagai informasi, Jumat (22/9/2023) banjir besar melanda lima kecamatan di Kabupaten Malinau yaitu Kecamatan Mentarang, Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Barat, dan Kecamatan Malinau Utara akibat meluapnya sungai Mentarang dan Sungai Sesayap.

Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen TP sempat meminta Pemerintah Pusat ikut turun untuk membantu Pemerintah Daerah melakukan upaya penanggulangan.

"Karena banjir tidak hanya terjadi di Malinau, tetapi juga melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Nunukan, jadi ini sudah termasuk skala Nasional," tuturnya.

Menurut Wakil Gubernur, banjir yang terjadi di Malinau itu adalah yang terbesar yang pernah ia rasakan, setelah banjir besar sebelumnya pada 1997. Sebab melalui pantauan udara hampir 80 persen desa di Malinau terendam.

Dari pantauan darat, Wakil Gubernur yang juga

tinggal di Malinau ini, mengatakan hampir semua jalan terendam banjir dan ada yang hingga seleher orang dewasa. Dari bandara menuju rumah pribadinya, Wagub berganti tiga alat transportasi, yang pertama menggunakan mobil, kemudian perahu kayu dengan mesin tempel, dan perahu kecil atau ketinting.

Banjir di Malinau menyebabkan 181 jiwa mengungsi, empat rumah warga hanyut di Desa Paking, Kecamatan Mentarang, dan empat rumah rusak berat di Desa Harapan Maju, juga di Kecamatan Mentarang.

Adapun banjir di Kabupaten Nunukan, BPBD Kalimantan Utara mencatat berdampak terhadap 3.782 warga dan 1.562 unit rumah warga yang tersebar di 38 desa di empat kecamatan yaitu Kecamatan Sembakung Atulai (1.382 jiwa), Kecamatan Lumbis Pensiangan (595 jiwa), Kecamatan Lumbis Ogong (1.712), dan Kecamatan Lumbis Hulu (51 jiwa). **BIRO ADPIM**



Gubernur dan Wakil Gubernur berfoto bersama dengan kader PKK pada temu kader PKK Pusat yang dihadiri Ketua Umum TP-PKK Hj. Tri Suswati Tito Karnavian di Tanjung Selor, 26 September 2023.

Menggapai Kesetaraan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kalimantan Utara sebesar 0,444, atau turun 0,028 poin pada 2022 dibanding 2021 yang sebesar 0,472. Ini dipengaruhi kesetaraan capaian pada dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan indikator wanita melahirkan tidak di fasilitas kesehatan.

Indikator wanita melahirkan tidak di fasilitas kesehatan turun dari 8,0 persen pada 2021 menjadi 5,6 persen pada 2022, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ada juga perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan indikator persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas yang meningkat lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Persentase perempuan meningkat dari 38,66 persen pada 2021 menjadi 41,48 persen, sedangkan persentase laki-laki meningkat dari 46,07 persen menjadi 47,27 persen pada 2022.

Dimensi pasar tenaga kerja ikut mengalami perbaikan. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat partisipasi angkatan kerja (TAPK) baik perempuan maupun laki-laki. TPAK laki laki meningkat dari 81,75 persen pada 2021 menjadi 83,67 persen pada 2022. Sedangkan TPAK perempuan meningkat dari 48,44 persen pada 2021 menjadi 49,30 persen pada 2022.

Ketimpangan gender Kalimantan Utara sejak 2018 hingga 2022 mengalami pergerakan yang fluktuatif. Sejak 2018 hingga 2022, IKG berkurang sebesar 0,037 poin.

Hal itu mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik. Penurunan ketimpangan gender terbesar terjadi pada 2020 yang turun 0,029 poin yang utamanya dipengaruhi oleh menurunnya ketimpangan dalam keterwakilan di legislatif.

Keterwakilan perempuan di legislatif meningkat dari 11,43 persen pada 2019 menjadi 14,29 persen pada 2020. Sementara keterwakilan laki-laki di legislatif turun dari 88,57 persen pada 2019 menjadi 85,71 persen pada 2020.

Mas'ud Rifai menyimpulkan, ketiga dimensi pembentuk IKG secara konsisten mengalami perbaikan. Dimensi kesehatan reproduksi membaik, risiko perempuan dalam kesehatan reproduksi semakin menurun. Sementara, dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja semakin setara.

Adapun pencapaian IKG pada tingkat kabupaten/kota sepanjang kurun waktu 2018-2022 mengindikasikan perkembangan ketimpangan gender yang semakin baik. Sebagian besar kabupaten/kota setiap tahun mengalami penurunan ketimpangan. Pada 2022, ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kota Tarakan, diikuti oleh Nunukan, Bulungan,

Tana Tidung, dan Malinau.

Sebanyak tiga kabupaten/kota mengalami penurunan ketimpangan gender. Kota Tarakan mengalami penurunan ketimpangan gender paling tinggi, terutama disebabkan oleh perbaikan dimensi pasar tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada 2022 meningkat sebesar 4,50 persen poin, sementara laki-laki meningkat 0,04 persen poin.

Untuk diketahui, penghitungan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengadopsi penghitungan *Gender Inequality Index (GII)* dari *United Nations Development Programme (UNDP)* dengan beberapa penyesuaian.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator MTF dan MHPK20, dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas dan persentase anggota legislatif, dan dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator TPAK.

IKG bernilai antara nol dan satu. Semakin kecil nilainya maka tingkat ketimpangan gender di suatu wilayah akan semakin setara dan sebaliknya. **BIRO ADPIM**

Bergerak Maju Pembangunan Manusia



Pembangunan manusia di Kalimantan Utara mulai kembali menunjukkan kemajuan pada 2021 hingga saat ini. Adanya kemajuan ini mengindikasikan bahwa kesempatan penduduk Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya semakin membaik.

Penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi turut mendukung pembangunan manusia menjadi lebih baik. Dari sisi penanganan pandemi, cakupan vaksinasi semakin meluas dan tingkat kematian akibat COVID-19 semakin rendah.

Dari sisi ekonomi, terlihat indikator-indikator makro menunjukkan perbaikan. Laju pertumbuhan ekonomi mulai meningkat sejak 2021 sebesar 3,98 persen dan pada 2022 sebesar 5,34 persen.

Keadaan ketenagakerjaan juga semakin membaik dilihat dari tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun, dan penduduk usia kerja yang terdampak pandemi berkurang secara signifikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara pada 2022 tercatat sebesar 71,83, meningkat 0,64 poin dari tahun sebelumnya. Capaian ini didukung adanya peningkatan dari semua komponen penyusun IPM. Dengan capaian ini, status pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Utara masih berstatus tinggi.

Dirinci menurut capaian masing-masing komponen pembentuk IPM, dapat dijelaskan bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir

tercatat 72,67 tahun. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,67 tahun, lebih lama 0,02 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya.

Harapan Lama Sekolah (HLS) tercatat 13,06 tahun yang berarti anak-anak yang pada tahun 2022 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,06 tahun atau hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang Diploma I. HLS 2022 tercatat lebih lama 0,12 tahun dibandingkan dengan tahun 2021.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tercatat 9,27 tahun yang berarti penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9 tahun atau setara dengan lulus SMP. Angka ini juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 9,11 tahun.

Pengeluaran per kapita disesuaikan tercatat sebesar 9,350 juta rupiah/orang/tahun yang berarti secara riil, pada tahun 2022 masyarakat Kalimantan Utara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 9,350 juta rupiah/orang/tahun.

Secara nasional, IPM Provinsi Kalimantan Utara 2022 berada pada urutan ke-21. Sementara itu, jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di pulau Kalimantan, Kalimantan Utara menempati urutan ketiga, setelah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Selama periode 2013-2022, IPM Kalimantan Utara selalu mengalami peningkatan setiap

tahun, kecuali pada 2020, akibat terdampak pandemi COVID-19. Pada periode tersebut, IPM Kalimantan Utara telah meningkat sebesar 3,84 poin, dari 67,99 pada tahun 2013 menjadi 71,83 pada 2022.

Sebelum pandemi (2013-2019), IPM Kalimantan Utara tumbuh rata-rata sebesar 0,76 persen per tahun. Namun, pada 2020, IPM Kalimantan Utara mengalami penurunan 0,73 persen. IPM Kalimantan Utara mulai kembali membaik dan tumbuh lebih cepat mulai 2021 hingga saat ini.
BIRO ADPIM

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KALIMANTAN UTARA



- IPM Kalimantan Utara tumbuh rata-rata 0,76 persen per tahun
- IPM Provinsi Kalimantan Utara 2022 berada pada urutan ke-21, Urutan ketiga di Kalimantan setelah Provinsi Kalimantan Timur (77,44 pada 2022) dan Kalimantan Selatan (71,84 pada 2022).

• IPM menjejaskan penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

• IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

• IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan, dan Standar hidup layak.

Perubahan Perilaku Masyarakat Kunci Atasi *Stunting*

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara optimistis mampu menurunkan angka *stunting* menjadi 14 persen pada 2024, sesuai target prevalensi Nasional, bahkan lebih dari target itu.

"Kita optimistis karena pada tiga tahun terakhir Kalimantan Utara mengalami penurunan signifikan dari 27 persen menjadi 22 persen, sekarang sisa 17 persen, berarti sisa 3 persen lagi," kata Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si di Tanjung Selor, Agustus.

Wakil Gubernur mengatakan bahwa upaya penurunan angka *stunting* tidak berbicara angka target semata. Yang paling utama, perlu upaya bersama-sama melakukan perbaikan kualitas dan perilaku hidup masyarakat.

Dia bertutur, potensi asupan gizi di Kalimantan Utara sangat besar, didukung potensi pangan dari sektor pertanian, perkebunan, maupun perikanan. Menurut Wakil Gubernur, yang perlu ditingkatkan adalah mengelola pangan menjadi asupan makanan yang berkualitas dan bergizi.

"Maka yang paling utama adalah perubahan perilaku dan cara pandang masyarakat, bukan pada institusi kelembagaan, maka kalau masyarakat berubah, *stunting* akan hilang," tuturnya.

Yansen TP bertutur, penanganan *stunting* merupakan prioritas nasional, bahkan Presiden RI Joko Widodo menargetkan angka prevalensi *stunting* sebesar 14 persen pada 2024. Angka tersebut di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 20 persen berdasarkan kesepakatan bersama Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Lebih dari itu, pada 2030 Indonesia ditargetkan dapat bebas *stunting* sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui prinsip "No One Left Behind".

Perlu diingat bersama bahwa *stunting* bukan hanya tentang tinggi badan tetapi juga dampaknya pada perkembangan otak dan kemampuan intelektual anak, maka intervensi *stunting* harus dilakukan komprehensif dan komitmen para pihak.

Adapun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen terus melakukan percepatan penurunan *stunting* dengan melaksanakan penguatan pada mekanisme kolaborasi baik dari aspek penyediaan data, perencanaan program kegiatan.



Wakil Gubernur Dr. Yansen TP dan Sekretaris Utama BKKBN RI Drs. Tavip Agus Rayanto memberi makan tambahan kepada balita di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan.

Merujuk data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), saat ini angka prevalensi *stunting* Kalimantan Utara mengalami penurunan sebesar 5,4 persen dengan capaian pada 2021 sebesar 27,5 persen dan 2022 sebesar 22,1 persen. Pada 2023 ini, angka prevalensi *stunting* ditarget turun lagi hingga mencapai 17,5 persen.

"Dari target yang ada, saya optimistis dapat mencapai target nasional yaitu 14 persen pada 2024," ujar dia.

Wakil Gubernur menyebut percepatan penurunan *stunting* memerlukan komitmen kuat semua elemen. Dan lebih dari itu, membutuhkan kolaborasi dan kerja sama berbagai pihak untuk memastikan konvergensi antar program hingga tingkat desa/kelurahan.

"Penurunan *stunting* membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah hingga desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan," tutur dia.

Dalam upaya kita mengejar target penurunan angka *stunting*, Wakil Gubernur mengajak kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota, harus berinvestasi pada intervensi gizi sejak sekarang.

Menurutnya, investasi ini menjadi kunci yang akan membentuk masa depan Provinsi Kaltara. Studi Bank Dunia menyatakan bahwa 15 ribu rupiah (setara 1 dollar AS) yang diinvestasikan pada program gizi, dapat menghasilkan keuntungan berlipat kali lipat.

"Sebaliknya, studi ini juga menunjukkan bahwa kerugian akibat *stunting* dan kekurangan gizi akan berdampak pada pengurangan sedikitnya tiga persen produk domestik bruto sebuah wilayah," tuturnya.

Wagub minta ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten/Kota dan perangkatnya mensinergikan sektor kesehatan, sektor pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta sektor pengembangan sarana dan prasarana wilayah, untuk fokus menjadi tritunggal dalam penanganan persoalan *stunting*.

Juga kepada Bappeda dan Litbang dapat dengan cermat melihat dan mengawasi proses penganggaran, baik yang berasal dari APBD maupun dana alokasi khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.

Dia menegaskan, anggaran percepatan penurunan *stunting* porsinya tidak boleh hanya untuk rapat-rapat, perjalanan dinas, dan hal-hal yang sifatnya tidak langsung menyentuh kepada sasaran keluarga. Sebaliknya, harus menyentuh kelompok sasaran serta menyentuh langsung faktor penyebab *stunting* porsinya 80 persen dari penganggaran.

"Lakukan pemilahan dengan cermat, yang sudah dianggarkan melalui dana alokasi khusus jangan lagi dianggarkan dengan anggaran daerah, sifatnya harus komplemen saling melengkapi," tutur dia.



Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si menerima piagam dari Sekretaris Utama BKKBN RI Tavip Agus Rayanto, atas raihan sebagai provinsi terbaik ketiga di Indonesia dalam menurunkan *stunting* 2022, 23 Juni 2023 di Kota Tarakan.

Provinsi Terbaik Ketiga Turunkan *Stunting*

Provinsi Kalimantan Utara telah membuktikan keseriusan menurunkan prevalensi *stunting*. Bahkan, daerah ini menerima penghargaan sebagai provinsi terbaik ketiga dalam pencapaian penurunan angka *stunting* menurut data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.

"Selamat karena telah bekerja keras sehingga meraih posisi tiga terbaik Nasional menurunkan *stunting*," kata Sekretaris Utama BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto di Tarakan, Juni 2023.

Piagam penghargaan dari Pemerintah untuk Provinsi Kalimantan Utara diserahkan oleh Sekretaris Utama BKKBN RI Tavip Agus Rayanto mewakili Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, kepada Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si pada kegiatan Gala Dinner Semesta Mencegah *Stunting* - Bulan Bakti Pancasila, Gotong Royong Mencegah *Stunting* di Kota Tarakan, Jumat (23/6/2023).

Tavip Agus Rayanto mengatakan, menurut SSGI Kementerian Kesehatan, prevalensi *stunting* di Indonesia mencapai 21,6 persen pada 2022. Angka ini merupakan yang terendah dalam sedekade terakhir.

Adapun Provinsi Kalimantan Utara mampu menurunkan *stunting* 5,4 persen, dari 27,5 persen pada 2021 menjadi 22,1 pada 2022, dan masuk dalam tiga besar Nasional provinsi di Indonesia dengan penurunan *stunting* di atas lima persen.

Provinsi dengan tingkat penurunan tertinggi

adalah Sumatera Selatan turun 6,2 persen dari 24,8 persen pada 2021 menjadi 18,6 persen pada 2022. Urutan kedua, Kalimantan Selatan juga turun 5,4 persen dari 30 persen pada 2021 menjadi 24,6 pada 2022.

Dr. Yansen TP, M.Si mengatakan capaian itu buah kerja keras seluruh pihak, dimulai sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan.

Dia mengatakan, sisa waktu kurang dari dua tahun untuk mencapai target penurunan *stunting* secara Nasional, yaitu pada angka 14 persen pada 2024 merupakan tantangan besar.

Namun, ia optimistis target tersebut dapat dicapai bahkan lebih rendah dari 14 persen. Sebab seluruh komponen telah terlibat dalam penanganan *stunting* di Kalimantan Utara.

Bahkan, perusahaan swasta atau investor yang menanamkan modalnya di Kalimantan Utara diundang secara khusus pada Gala Dinner Semesta Mencegah *Stunting*, Jumat (23/6/2023) malam, untuk menyatukan pemahaman serta langkah konkret dalam upaya terus menurunkan *stunting* di Kaltara yang jumlahnya disebut Wagub mencapai 3.700 anak.

"Jika dunia usaha atau investor ikut bergerak bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah, saya optimis *stunting* dapat selesai dan kita tekan hingga nol kasus sebelum 2024," kata dia.

Penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberikan penghargaan Pemerintah Kabupaten/Kota atas kinerjanya dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting*, dan Kabupaten Bulungan sebagai yang terbaik.

"Penghargaan ini sebagai pemacu semangat agar terus berusaha menurunkan *stunting*," kata Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si di Tarakan, Juni.

Pemerintah Kabupaten Bulungan ditetapkan sebagai juara umum hasil penilaian kinerja pelaksanaan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* dengan skor 85,7, sehingga meraih piala bergilir Gubernur.

Piala bergilir itu diserahkan Wakil Gubernur kepada Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala pada pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana dan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Kaltara di Kota Tarakan, 22 Juni 2023.

Terbaik dua diraih Pemkot Tarakan dengan skor 83,03; terbaik tiga diraih Pemkab Tana Tidung dengan skor 78,03.

Pemda peraih penghargaan ini ditetapkan dalam lampiran Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.308/2023 tentang Penetapan Hasil Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Delapan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Kaltara 2023.

Keputusan gubernur ini juga memuat hasil penilaian inovasi dan kunjungan lapangan kinerja pelaksanaan aksi konvergensi penurunan *stunting*. Kabupaten Nunukan ditetapkan sebagai Daerah Inovatif Pertama dengan skor 93,01 dan Kabupaten Malinau sebagai Daerah Inovatif Kedua.

Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan Penanganan *Stunting* (TPPS) Provinsi Kalimantan Utara memberikan penghargaan apresiasi kepada TPPS Kabupaten/Kota kategori Penurunan *Stunting* Terbaik versi data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 kepada TPPS Tarakan (terbaik pertama); TPPS Bulungan (terbaik kedua); dan TPPS Malinau (terbaik ketiga).

Sebagai informasi, delapan aksi konvergensi penurunan *stunting* mencakup analisis situasi; rencana kegiatan; rebus *stunting*; peraturan bupati/walikota tentang peran desa; pembinaan kader pembangunan manusia; sistem manajemen data *stunting*; pengukuran dan publikasi *stunting*; dan peninjauan ulang kinerja tahunan. **BIRO ADPIM**

Perlunya Dukungan Swasta



Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si memberi arahan kepada masyarakat dan pihak perusahaan (BUMN) di Pulau Bunyu untuk meningkatkan kontribusi pada upaya penurunan stunting di Kaltara dan Nasional.

Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Dr Yansen TP, M.Si meminta perusahaan di Kaltara berkolaborasi bersama Pemerintah dan stakeholder lainnya menurunkan stunting.

Seperti yang diapresiasi Wakil Gubernur adalah Program Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan PT. Pertamina Bunyu Field di Kecamatan Bunyu, Bulungan. Wakil Gubernur mengatakan kepedulian Pertamina harus diacungi jempol.

"Kita bangga menyaksikan euforia semangat kader penanganan stunting yang luar biasa, berkolaborasi dengan Pertamina. Ini yang seharusnya memang kita saksikan. Ada kepedulian sosial," ujar Wakil Gubernur di Bunyu bertepatan kunjungan kerjanya bersama BKKBN RI ke lokasi program pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan penurunan stunting oleh PT. Pertamina EP Bunyu Field, 24 Juni 2023.

Untuk diketahui Program pemberdayaan masyarakat PT. Pertamina EP Bunyu Field adalah Bunga Kemuning, kepanjangan dari Bunyu Sumber Pangan Kreasi Menu Entaskan Stunting. Program ini kolaborasi seluruh mitra binaan Pertamina EP Bunyu untuk mewujudkan pengentasan stunting.

Program Bunga Kemuning merupakan peningkatan kerjasama program guna mendorong ketersediaan akses pangan untuk penuh gizi anak menuju generasi Indonesia Emas.

Selain itu, ada program Ketinting, kepanjangan dari Keluarga Terlindung Stunting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Indonesia Maju dapat tercapai.

Wakil Gubernur mengatakan di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan ditemukan 49 kasus stunting. Dan di Kaltara keseluruhan sebanyak 3.707 kasus.

Wakil Gubernur optimis kasus stunting dapat diturunkan 14 persen (sesuai target pemerintah pada 2024), bahkan lebih dari angkat tersebut.

Alasannya, semangat dan kebersamaan stakeholder yang terkait dalam upaya penurunan stunting di Kaltara telah terjalin dengan baik mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), desa, kecamatan, kabupaten/kota, tingkat sampai provinsi.

"Ditambah juga bantuan yang kuat dari Pemerintah khususnya BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) untuk penanganan stunting di Kaltara," ujar Wakil Gubernur. Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP mengatakan capaian tersebut merupakan buah kerja keras seluruh pihak, dimulai sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan.

Selain itu, ia juga meminta kepada perangkat

daerah terkait untuk dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting. "Jika ditemukan isu yang dapat menghambat pencapaian target, agar segera diatasi dan dilaporkan ke Ketua TPPS masing-masing,"katanya.

Tidak hanya itu, para bupati/wali kota diminta untuk memastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas di daerahnya. Ini harus didukung dengan sumber daya yang mencukupi dan tiap intervensi yang diperlukan harus sampai ke tingkat keluarga yang dikategorikan rawan stunting.

"Saya juga meminta kepada para akademisi, LSM, swasta, mitra pembangunan dan media agar mendukung dan mengawal pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian, tetapi memerlukan kolaborasi dan dukungan dari semua elemen," ujarnya. **BIRO ADPIM**

PREVALENSI STUNTING MENURUT KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2022

Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung	Tarakan
Tahun 2021 22,9%	Tahun 2021 24,2%	Tahun 2021 30%	Tahun 2021 22,8%	Tahun 2021 25,9%
Tahun 2022 18,9%	Tahun 2022 23,5%	Tahun 2022 30,5%	Tahun 2022 30,7%	Tahun 2022 15,4%

Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2021 **27,5%**
Tahun 2022 **22,1%**



"Sekali lagi bahwa kualitas keluarga, kualitas SDM itu menjadi kunci bagi negara kita untuk berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain. Dan, sinergitas antara Kementerian dan Lembaga, Pemda, Nakes, TNI-Polri, dan swasta ini penting sekali. Lingkungan dari air bersih, dari sanitasi, rumah yang sehat ini, memang kerja terintegrasi, harus terkonsolidasi betul."

Arahan Presiden Joko Widodo,
25 Januari 2023

Menekan Kemiskinan dengan Pemberdayaan Ekonomi



"Seperti menyediakan beasiswa dan peningkatan kualitas sekolah di daerah terpencil dapat membantu anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan yang layak dan meningkatkan peluang mereka di masa depan," tutur Gubernur.

Selanjutnya, adalah program pemberdayaan ekonomi dapat membantu orang miskin meningkatkan pendapatan mereka dan keluar dari kemiskinan. Ini meliputi pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, pembentukan koperasi, akses ke pasar dan peluang kerja, serta dukungan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Saya juga telah menginstruksikan kepada Disperindagkop UKM Kalimantan Utara untuk memberikan pembekalan keterampilan usaha kepada masyarakat kita," ungkapnya.

Tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara periode Maret 2023 kembali mengalami penurunan, berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada Maret 2021 tingkat kemiskinan mencapai 7,36 persen, tahun lalu turun menjadi 6,77 persen dan tahun ini kembali turun menjadi 6,45 persen.

Gubernur Kalimantan Utara Drs.H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum mengapresiasi segenap pihak yang terus berupaya menekan angka kemiskinan. Menurutnya, hal ini harus digenot terus untuk mewujudkan visi pembangunan daerah yaitu Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera.

Secara rinci, jumlah penduduk miskin Kalimantan Utara pada Maret 2023 sebanyak 47,97 ribu (6,45 persen). Pada Maret 2021 penduduk miskin berjumlah 52,86 ribu. Sedangkan tahun lalu penduduk miskin berjumlah 49,46 ribu.

Angka ini juga mengalami penurunan selama enam bulan terakhir. Pada September 2022 penduduk miskin berjumlah 50,58 ribu (6,86 persen). Jumlah penduduk miskin berkurang 2,6 ribu jiwa atau turun 0,41 persen.

Jumlah penduduk miskin daerah perkotaan mengalami penurunan baik secara absolut maupun persentase begitu juga dengan penduduk miskin daerah pedesaan mengalami penurunan secara absolut maupun persentase.

Tidak hanya itu, selama periode September 2022 hingga Maret 2023, penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 1,6 ribu jiwa dari 26,38 ribu orang pada September 2022 menjadi 24,75 ribu orang. Sedangkan pada Maret 2023 atau secara persentase turun sebesar 0,40 persen dari 5,58 persen menjadi 5,18 persen.

Penduduk Miskin di daerah pedesaan mengalami penurunan sebanyak 1,0 ribu jiwa dari 24,20 ribu orang pada September 2022 menjadi 23,22 ribu orang. Kemudian pada Maret 2023 atau secara persentase turun 0,41 persen dari 9,15 persen menjadi 8,74 persen.

Jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan lebih sedikit dibanding di daerah perkotaan. Meskipun begitu, persentase penduduk miskin yang berada di daerah pedesaan pada bulan Maret 2023 sebesar 8,74 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 5,18 persen.

Pola ini sama dengan kondisi September 2022 persentase penduduk miskin di perkotaan 5,58 persen sedangkan di pedesaan lebih tinggi 9,15 persen.

Gubernur mengungkapkan, pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui berbagai langkah. Dijelaskannya, menyediakan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua anak adalah langkah penting untuk mengurangi kemiskinan.

Selain itu, peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, energi, dan akses telekomunikasi dapat membuka aksesibilitas, mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dan menciptakan peluang ekonomi.

Tidak hanya itu, sektor pertanian dalam meningkatkan akses petani dan teknologi pertanian juga dapat membantu membantu mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan

"Program bantuan pertanian, pelatihan, pembiayaan, dan pengembangan kelembagaan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di Kaltara," sebutnya.

Layanan dasar seperti pemenuhan akses kesehatan berkualitas adalah faktor penting dalam menekan kemiskinan. Program-program peningkatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dapat membantu masyarakat miskin mendapatkan akses perawatan kesehatan yang diperlukan. **BIRO ADPIM**



Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.M.Hum menunjukkan sikap hormat pada upacara peringatan HUT Ke-78 RI di Krayan, Kabupaten Nunukan, 17 Agustus 2023.

Tak Pernah Ada Keraguan Eksistensi Nasionalisme di Kaltara

Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Ke-78 Republik Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Utara digelar pada dua daerah berbeda. Titik utamanya adalah Krayan, Kabupaten Nunukan. Di salah satu daerah terluar dan perbatasan NKRI itu, Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum menjadi inspektur pada upacara HUT Kemerdekaan yang berlangsung khidmat.

Kedua, dipusatkan di Tanjung Selor, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara sekaligus Ibu Kota Kabupaten Bulungan. Di sini, Wakil Gubernur Dr. Yansen T., M.Si menjadi inspektornya.

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara bersyukur, pada usia bangsa yang semakin dewasa, suasana kemerdekaan masih dapat dinikmati di bumi yang kaya kearifan lokal, sumber daya alam, dan majemuk masyarakatnya.

Keduanya mengharapkan Indonesia, secara khusus Kalimantan Utara, semakin berjaya, semakin menunjukkan jati diri sebagai sebuah daerah yang memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat.

Harapan akan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik terus berjalan baik. Begitupun kerja sama yang baik juga antar elite pemerintahan di tingkat nasional, provinsi, juga kabupaten/kota.

Kerja sama menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa dan daerah ke depan. Baik aspek sosial kemasyarakatan, aspek politik, maupun aspek ekonomi.

Oleh sebab itu, menjadi harapan besar, jiwa kebangsaan harus terus terbangun berlandaskan moral dan kesadaran sebagai masyarakat bangsa di Kalimantan Utara.

Apapun situasi dan tantangan Kalimantan Utara ke depan harus disikapi dalam bingkai kesatuan sebagai masyarakat bangsa. Tidak boleh mengabaikan sedikit perjalanan bangsa Indonesia ke depan yang penuh dengan tantangan.

Demikian untuk Kalimantan Utara, yang beraneka ragam latar belakang suku, agama tetap harus kuat dan kokoh hingga tak ada yang merintang dalam hal mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di Kalimantan Utara.

Kesadaran masyarakat Kalimantan Utara tentang eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara juga terus bertumbuh dalam menciptakan semangat untuk menjaga kesatuan dan keamanan wilayah.

Tak dapat dipungkiri beberapa tahun Kalimantan Utara bergelut dengan keterbatasan. Namun semua pihak harus optimistis, pembangunan semakin baik dan maju ke depan, khususnya pembangunan akses menuju daerah-daerah kawasan perbatasan negara.

Persoalan dengan negara tetangga bukan persoalan idealisme kebangsaan, tetapi sosial tatanan ekonomi. Maka, jika, aksesibilitas wilayah tertangani dengan baik, persoalan ekonomi akan teratasi.

Ideologi, kesadaran, dan eksistensi nasionalisme kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Kalimantan Utara tidak perlu diragukan dan tak pernah ada keraguan. **BIRO ADPIM**



Penghargaan adalah Motivasi

Banyak capaian prestasi yang diukir Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum dan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si sejauh ini.

Gubernur menyebut, Kalimantan Utara bukan lagi provinsi yang baru lahir, namun kini tumbuh menjadi provinsi yang sudah setara dengan saudara-saudaranya di Tanah Air.

"Kalimantan Utara sudah tidak dapat dipandang sebelah mata, atas capaian prestasi selama ini dan kita patut bersyukur, banyaknya penghargaan diraih untuk atas kerja keras kita semua," tutur Gubernur.

Di antara prestasi membanggakan ditorehkan Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.M.Hum. Ia meraih dua penghargaan sekaligus pada gelaran "Indonesia Future Leaders Awards (IFLA) 2023" yang dilaksanakan di Bali pada 23 Juni 2023.

Penghargaan yang diraih ialah "Best Future Leaders Indonesia 2023 Innovation Service In Public" dari Asia Global Council, dan "Innovator of The Year in Education 2023" dari International Education Group (IEG) Campus dan Seven Media Asia.

Best Future Leader Indonesia 2023 diberikan kepada para pemimpin inspiratif terbaik. Meliputi kepala daerah, legislatif atas pencapaian kinerja dan prestasi kepemimpinan juga melakukan perubahan serta inovasi baru dalam mewujudkan kemajuan bangsa.

Sedangkan *Innovator of The Year Education 2023*, diberikan oleh IEG Campus berdasarkan kepemimpinan dan dedikasi Gubernur Kalimantan Utara dalam bidang pendidikan.

Gubernur menyampaikan terima kasih atas penghargaan tersebut. Ia katakan, penghargaan itu semakin memotivasi dirinya berbuat bagi masyarakat.

"Terima kasih kepada Allah SWT dan juga terima kasih kepada seluruh masyarakat, tentunya, penghargaan ini untuk masyarakat," ujarnya.

"Dan tak lupa, kepada IEG Campus dan Seven Media Asia yang selalu memberikan inspirasi bagi kepala-kepala daerah untuk selalu berinovasi, selalu bekerja keras untuk memajukan pendidikan dan kesehatan di provinsi, kabupaten/kota di Indonesia ini," ujarnya.

Pada 23 Agustus 2023 Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A Paliwang juga dianugerahi penghargaan Penganugerahan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo.

Penghargaan ini diterima atas komitmen penyelesaian dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan. Selain Gubernur Kaltara, penghargaan serupa diraih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi,

Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, Bupati Kotabaru Sayed Jafar Al-Idrus, dan Bupati Bengkalis Kasmarni.

Menpora Dito mengapresiasi para kepala daerah tersebut. Ia berharap penghargaan dari pihaknya menjadi motivasi dan pemicu kepala daerah lain segera menyelesaikan rencana aksi daerah untuk pelayanan kepemudaan.

Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.M.Hum mengungkapkan Pemrov Kaltara sejauh ini memberi dukungan pembangunan kepemudaan.

Ia mengatakan bahwa pemuda adalah aset berharga bagi negara, dan melalui program-program berfokus pada pembinaan pemuda, Provinsi Kalimantan Utara semakin siap menghadapi masa depan.

"Terima kasih atas penghargaan ini, dan kami akan berkomitmen untuk terus memberikan perhatian serius terhadap pengembangan potensi pemuda di Provinsi Kaltara," ujar Gubernur. **BIRO ADPIM**



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA






Penghargaan

Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2023

- Penghargaan Pencapaian *Realisasi Anggaran Tertinggi Kedua (99,99%) Se-Indonesia* pada Satuan Kerja Dekonsentrasi Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara *raih Terbaik 3 Capaian Program HIV/AIDS dan PIMS 2022* oleh Kementerian Kesehatan RI
- Predikat *Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022* (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Publik) Provinsi Kalimantan Utara dari Kepala Perwakilan OMBUDSMAN RI Kaltara
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara *raih UHC Awards 2023*, Atas Capaian *Pemda yang telah Melindungi Penduduknya Lebih Dari 95% dan Telah Mendaftarkan Penduduknya* dalam Segmen P3PU Pemda
- APBD Award** atas Capaian *Realisasi Peningkatan PAD di Tanah Air*
- PPKM Award**, *Kategori Laboratorium dengan Performa Pemeriksaan COVID-19 Terbaik di Provinsi Kalimantan* oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meraih **Juara 1 SPM Awards 2023**, *Kategori Provinsi Berkinerja Terbaik Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) TA 2022*
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara *rahi 4 Penghargaan dari Accelerated Culture Transformation (ACT) Consulting/ESQ Group dalam pengimplementasian Core Values ASN Ber-AKHLAK*, diserahkan oleh Founder ESQ Group Ary Ginjar kepada Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum
- Penghargaan "**Top Pembina BUMD**" diberikan kepada Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum pada ajang *Top BUMD Awards 2023*
- Pemerintah *Anugerah Merdeka Belajar* Kategori Pemerintah Daerah Sub Kategori "Transformasi Pendidikan Vokasi" Dalam Rangka Bulan Merdeka Belajar Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2023
- Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum dianugerahi penghargaan dari Kemendes-PPPT RI atas *Kontribusi dan Kerja Keras dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guna Desa*
- WTP 9 Tahun Berturut-Turut** oleh **SPK RI**
- Penghargaan *Dedikasi, Kontribusi, dan Keberhasilan dalam Membangun Bidang Pertanian* diberikan kepada Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum pada *Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVI Tahun 2023*
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meraih "**Terbaik 2**" Kategori *Layanan Mutasi Kenaikan Pangkat Berbasis SIASN Terbaik*, "**Terbaik 5**" Kategori *Layanan Penetapan NIP/NIPPPK Berbasis SIASN Terbaik*, "**Terbaik 2**" Kategori *Layanan Integrasi Sistem CAT*, dan *Digitalisasi Tata Naskah Terbaik* dalam rangka *BAN Regional VII Award Tahun 2023*
- Gubernur Kalimantan Utara mendapatkan penghargaan *Innovator of The Year in Education dan Best Future Leaders Indonesia 2023 Innovation Service In Public* oleh *The Leader Magazine*
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara *rahi "Terbaik 3 Penurunan Angka Prevalensi Stunting" Menurut Data SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) Tahun 2022*, diserahkan Sekretaris Utama BKKBN RI Tawip Agus Rayanto kepada Wakil Gubernur Kaltara Dr. Yansen TP, M.Si
- Program *PROLANTERAKU (Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara)* *rahi TOP 5 CAPSI dalam rangka lomba Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji NIPP 2023* oleh Kementerian BB

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) **Drs. H. Zainal A Paliwang** dianugerahi penghargaan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Ariotedjo karena telah menyusun **Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan**. Penganugerahan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan digelar di Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Gubernur Kalimantan Utara **Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum** menerima penghargaan "**Apresiasi Tokoh Indonesia**" kategori **Percepatan Infrastruktur**. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada Gubernur Zainal di Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meraih penghargaan **Indonesia Awards tahun 2023** untuk Kementerian Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah dengan kategori **Special Recognition of Outstanding Initiative atas inovasi Si Payung Emakku (Sistem Informasi Pengaduan, Konsultasi dan Edukasi Perlindungan Perempuan dan Anak)**



Sumber : Dilansir dari Biro Administrasi Pimpinan

BIRO ADPIM KALTARA

Konsistensi Opini WTP



Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum menerima dokumen laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2022 dari Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang di Tanjung Selor 25 Mei 2023. Pada LKPD Provinsi Kaltara 2022 kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, atau kesembilan kali berturut-turut.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kesembilan kalinya berturut-turut atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022.

"Kami bersyukur dan berharap WTP ini menjadi gambaran kesejahteraan masyarakat," kata Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum di Tanjung Selor 25 Mei 2023.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berterima kasih atas supervisi BPK RI terhadap penyusunan laporan keuangan daerah sejauh ini serta berkomitmen melaksanakan program pembangunan dan menyajikan laporan realisasi anggaran pelaksanaan pembangunan semaksimal mungkin sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang dikelola.

Terhadap WTP yang diraih, Gubernur Kalimantan Utara menyatakan bersyukur atas raihan itu dan paling penting agar predikat WTP berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengatakan, opini WTP merupakan buah dari kerja keras seluruh pihak. Maka itu ia mengapresiasi seluruh perangkat daerah atas kerja sama dalam pelaksanaan program

pembangunan dan penyajian laporan keuangan.

Kunci mempertahankan opini WTP dijaga Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan melakukan langkah penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Termasuk melakukan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan sampai pelaporan; serta secara konsisten meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang keuangan dan aset melalui bimbingan teknis dan pendampingan yang dilakukan oleh BPKP.

Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang berpesan bahwa meski Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah mencapai opini WTP bahkan sembilan tahun berturut-turut, namun tetap dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangannya. Ia mengingatkan rekomendasi yang diberikan oleh BPK agar segera ditindaklanjuti sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga diminta meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dan lebih menekan tingkat pengangguran demi sempurnanya Opini WTP.

Apresiasi disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara Albertus Stefanus raihan opini WTP untuk kali kesembilan berturut-turut. Menurutnya, ini capaian yang istimewa dan luar biasa.

"Tentu saja WTP tidak membuat kita terlena tetapi justru terus menjadi dorongan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan teliti," demikian Ketua DPRD. **BIRO ADPIM**

Sampai Jumpa di Tana Tidung



Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si berfoto bersama dengan sejumlah pejabat Kanwil Kementerian Agama, Dewan Hakim, dan peraih juara pada MTQ Ke-VIII Tingkat Provinsi Kaltara di Kota Tarakan pada 19 Juni 2023.

Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum mengharapkan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-VIII Tingkat Provinsi Kalimantan Utara 2023 memperkokoh nilai-nilai agama khususnya kandungan Al-Quran dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan berbangsa.

"Juga sebagai sebagai syiar Islam dan silaturahmi menuju kebersamaan umat," kata Gubernur Kaltara kala membuka MTQ Ke-VIII Tingkat Provinsi Kaltara 2023 di Islamic Centre, Kota Tarakan, 19 Juni 2023) malam.

Gubernur menaruh harapan besar MTQ VIII Tingkat Provinsi Kalimantan Utara wadah seleksi peserta terbaik untuk mewakili provinsi ini pada MTQ Nasional.

Pada 22 April, MTQ Ke-VIII Provinsi Kalimantan Utara 2023 ini ditutup oleh Wakil Gubernur Yansen TP, melalui prosesi menabuh bedug raksasa.

Kabupaten Bulungan sebagai juara umum MTQ kali ini, mempertahankan status juara bertahan. Prosepsi penutupan ini sekaligus menetapkan Kabupaten Tana Tidung sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ Ke-IX Provinsi Kalimantan Utara 2024 mendatang ditandai penyerahan bendera MTQ dari Wakil Gubernur kepada Sekda Tana Tidung.

Pada penutupan MTQ ini, Wakil Gubernur Kalimantan Utara mengalungkan medali satu per satu kepada peraih juara, didampingi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Utara, H. Saifi yang memberi sertifikat kepada para juara. Wakil Gubernur menyampaikan titel juara lomba MTQ tingkat provinsi ini hanya pemantik semangat untuk terus mendalami ilmu dalam Al-Quran.

"Karena itu, meski semua peserta di sini bermusabaqah, namun inti utama lomba ini adalah silaturahmi dan persaudaraan," ujarnya. Ia mengatakan, tujuan utama ajang MTQ adalah seluruh peserta menjadi contoh bagi keluarga dan masyarakat untuk menyebarkan ajaran kebaikan Islam, sebab Al-Quran sumber petunjuk hidup yang aktual sepanjang masa dan berisi nilai luhur universal.

Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Kalimantan Utara, Datu Iqro Ramadhan mengatakan hasil MTQ ini bukan akhir kejuaraan. Melainkan sebagai awal persiapan Provinsi Kalimantan Utara menghadapi Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Nasional pada Oktober 2023 di Provinsi Jambi.

Dia menegaskan, LPTQ Kalimantan Utara terus mendorong dan mengutamakan anak-anak muda terbaik Kalimantan Utara mewakili provinsi ini perlombaan tingkat Nasional.



"Karena ini akan memberi pengalaman kepada anak-anak Kalimantan Utara bertanding di level Nasional," tutur dia. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Utara, H. Saifi mengatakan pelaksanaan MTQ VIII 2023 Provinsi Kalimantan Utara telah berjalan baik dan lancar. Ia menyebut ajang ini sebagai wahana memacu pengembangan tilawah dan peningkatan pemahaman Quran, dan syiar Islam. **BIRO ADPIM**

Kreativitas Anak Muda Memesona Malam Tanjung Selor yang Remang



Foto-foto Musik Alam Fest 2K23



Musik Alam Fest 2K23 sukses menyuguhkan musikalisasi dikomposisi suasana alam Hutan Kota Bunda Hayati, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Jumat 29 September 2023 malam.

Penampilan musisi dan seniman lokal merajut dua hari penyelenggaraan Musik Alam Fest 2K23 dengan suasana malam Kota Tanjung Selor yang remang.

Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Yansen TP, M.Si pada kesempatan itu mengajak generasi muda sadar peluang kemajuan Kalimantan Utara ke depan. Hal tersebut harus disambut dengan persiapan yang matang sejak sekarang.

Pandangan Yansen TP, Musik Alam Fest 2K23 merupakan gambaran anak muda di Kalimantan Utara memiliki potensi yang luar biasa. Daerah ini telah memiliki bibit penerus untuk menyongsong kemajuan peradaban selanjutnya.

"Saya merasa bangga dan bahagia, saya dapat melihat masa depan Kalimantan Utara ada di generasi yang tepat, anak muda harus terus berguna dan memberikan manfaat," ujarnya.

Wakil Gubernur menegaskan, perhelatan festival ini tidak bisa dipandang sederhana begitu saja. Ada nilai kreatifitas dan semangat luar biasa anak muda yang merupakan hal berharga dalam mewarnai tonggak pembangunan.

Ia juga menyebut Kalimantan Utara dengan jumlah penduduk yang kecil menyimpan keanekaragaman hayati dan budaya yang luar biasa.

Secara umum provinsi ini disebut sebagai salah satu masa depan Indonesia dengan pengembangan energi hijau yang dimiliki. Kalimantan Utara ke depan bisa menjadi provinsi terkaya di Indonesia dengan industri hijau terbesar se-Indonesia yang ada di Tanah Kuning dan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Malinau.

"Saya sebutkan ini karena akan mewarnai perjalanan Kaltara ke depan dalam menopang kemajuan Indonesia," ujarnya.

Musik Alam Fest 2K23 oleh Pemerintah RI didapuk menjadi salah satu atraksi seni kebudayaan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan keterlibatan UMKM.

Festival ini pun mendapat apresiasi dari Staf Ahli Menparekraf (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi, Raden Kurleni Ukar.

Terpilih menjadi Top 100 Kharisma Event Nusantara lebih dari tiga tahun, menurut Raden Kurleni adalah luar biasa.



"Bisa masuk saja itu susah, apalagi mempertahankan, ini luar biasa, kami sangat mengapresiasi," katanya saat menghadiri pembukaan Musik Alam Fest di Hutan Kota Bunda Hayati Tanjung Selor, 29 September 2023.

Musik Alam Fest dinilai punya konsep menarik, memadukan festival musik dengan kampanye konservasi alam dan promosi serta pelestarian budaya. Festival ini dipercaya berkontribusi terhadap pencapaian target wisatawan yang dicanangkan Kemenparekraf RI.

"Saya yakin, Musik Alam Fest 2K23 sama-sama mendukung upaya pemulihan ekonomi di sektor wisata, pencapaian target 1,4 miliar kunjungan wisatawan nusantara dan 6 juta kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia," tutur Kurleni.

Pemerintah melihat Kalimantan Utara memiliki banyak potensi wisata. Ini bisa menjadi modal yang besar untuk menggeliatkan pertumbuhan sektor pariwisata di daerah.

"Bulungan dan Kalimantan Utara punya berbagai potensi wisata, ini bisa menjadi standing poin," ujarnya.

Potensi ini harus diperkuat dengan promosi yang bagus dan pelaksanaan event berkualitas.

Tema "Kolaborasi" yang diusung Musik Alam Fest 2K23 dinilai sejalan dengan semangat kinerja di Kemenparekraf. Kementerian yang dipimpin Sandiaga Uno ini disebut selalu mengedepankan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi.

"Mari kita terus sama sama gerak cepat, gerak bersama dan menggerakkan potensi yang ada untuk menumbuhkan pariwisata di Indonesia," ujarnya.

Kurleni meminta Pemerintah Daerah bisa terus memberi ruang untuk perhelatan kegiatan seperti ini. Dia menilai anak muda perlu diberi kesempatan dan dirangkul untuk mensukseskan seluruh agenda pembangunan, termasuk bidang pariwisata.

"Kreatifitas anak muda seperti ini adalah aset berharga, mereka harus terus didukung untuk bisa lebih mengeksplor kemampuannya," kata Kurleni.

Leader of Event Musik Alam Fest 2K23, Irawati Tahir, menyampaikan menjaga keberlangsungan Musik Alam Fest hingga tahun ketujuhnya saat ini tidaklah gampang.

"Musik Alam Fest sudah terlaksana dari 2017 sampai 2023, untuk sampai pada tujuh tahun ini tidaklah gampang, butuh banyak perjuangan,"

kata Ira.

Ira kemudian menceritakan singkat perjalanan festival ini dari tahun ke tahun. Setelah dua tahun terselenggara, acara yang menggabungkan pelestarian budaya dan lingkungan ini menjajaki kolaborasi dengan Pemerintah Daerah.

"Pada 2019 kami berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kaltara, kami dikurasi apakah Musik Alam Fest layak masuk Top 100 Event atau tidak," ujar dia.

Kesungguhan dibarengi kerja keras "Aliansi Komunitas Kaltara" sebagai penggagas kegiatan berbuah manis. Musik Alam Fest masuk pada Top 100 Kharisma Event Nusantara pada 2019.

"Kami telah membuktikan bahwa Musik Alam Fest layak masuk Top 100 Kharisma Event," kata Ira.

Kesuksesan yang diraih Musik Alam Fest 2K23 disebut tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak.

"Tanpa adanya kolaborasi tentu kami tidak bisa berbuat apa apa. Maka dari itu, perayaan ketujuh ini mengambil tema kolaborasi, berasal dari kata kolaborasi dan aksi," demikian Irawati. **BIRO ADPIM**

**INDUSTRI
LOKAL**

Sasar

**PASAR
GLOBAL**

